

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN DAN PROYEKSI EKONOMI DAERAH

Dinamika perkembangan dan pertumbuhan Kota Ambon periode lima tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang cukup baik. Kondisi demikian ikut memicu pertumbuhan dan kemajuan yang cukup positif dan berkelanjutan pada berbagai bidang. Perkembangan yang cukup positif ini, perlu didukung dengan kemajuan tata kelola manajemen keuangan agar mampu menunjang akselerasi berbagai aktivitas pembangunan di daerah. Olehnya itu, kebijakan pengelolaan dan penataan manajemen keuangan daerah yang baik dan berkualitas patut dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan karena akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* menuju pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Prinsip utama yang dilakukan dalam proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari bagaimana mengelola perencanaan yang baik, pelaksanaan yang terstruktur dan terukur, berkualitas serta pengawasan maupun pemeriksaan yang tertib dan akuntabilitas. Hal ini penting agar setiap pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, kebijakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawabannya harus mempertimbangkan serta mempedomani peraturan perundang-undangan, antara lain;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD;

Berbagai regulasi tentang keuangan daerah dimaksud bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah agar dapat mengelola keuangan daerahnya dengan mengutamakan prinsip efisien, efektif, ekonomis, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip demikian bukan untuk menutup ruang bagi daerah melaksanakan kewenangannya, namun melalui berbagai produk peraturan perundang-undangan tersebut, memberi kewenangan kepada daerah dalam perencanaan penganggaran keuangan daerah yang berkualitas.

Dalam setiap perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, hal penting yang perlu diperhatikan adalah memfokuskan alokasi penganggaran pada program-program peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari sinilah dapat diukur kapasitas dan kualitas pemerintah daerah mengelola keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan masyarakat.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.

Prinsip-prinsip utama yang menjadi fokus perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Sistem demikian harus terintegrasi dan terstruktur secara baik dalam kebijakan penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD sebagai instrumen penting dalam menjaga keserasian, keselarasan dan kesinambungan penganggaran keuangan daerah akan berfungsi sangat efektif dalam proses pengambilan keputusan, baik terhadap sisi pendapatan maupun belanja daerah. Mekanisme ini perlu

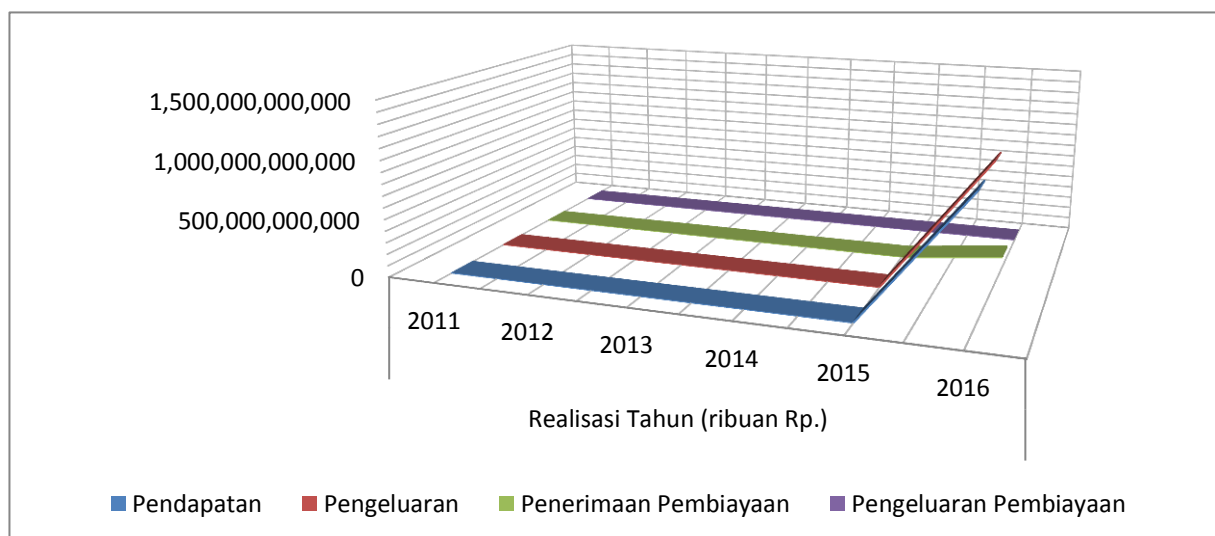
diptimalkan dan ditingkatkan, karena melalui sistem manajemen pengelolaan keuangan yang baik, dipastikan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kota Ambon pada periode tahun 2017-2022.

Historis penataan dan pengelolaan manajemen keuangan daerah Kota Ambon pada masa lalu, selayaknya menjadi gambaran untuk menganalisis kebijakan masa akan datang. Karena dengan gambaran kemampuan pengelolaan keuangan tersebut, dapat digunakan sebagai dasar menganalisis serta memprediksi kinerja kemampuan pemerintah Kota Ambon dalam pelaksanaan APBD lima tahun berikutnya. Belajar dari pengalaman pengelolaan keuangan pemerintah Kota Ambon, maka gambaran kinerja kebijakan pengelolaan keuangan selama tahun 2011-2016, yang meliputi sisi pendapatan daerah maupun sisi belanjadaerah secara rinci dapat diikuti pada Tabel III.1 dan Gambar III.1.

Tabel III.1. Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon
Tahun 2011-2016

No	Uraian	Realisasi Tahun (ribuan Rp.)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pendapatan	696.633.127	746.464.901	848.612.715	953.210.956	1.085.237.401	1.100.953.632.939
2.	Belanja	659.484.851	756.207.851	829.655.382	891.896.488	1.058.194.281	1.127.555.904.387
3.	Penerimaan Pembiayaan	8.639.558	33.357.285	10.756.405	24.713.737	84.743.296	94.676.536.437
4.	Pengeluaran Pembiayaan	22.855.852	12.862.430	5.000.000	2.696.992	4.046.221	1.882.703.653

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon, 2017



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon, 2017

Gambar III.1. Grafik Realisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Ambon Tahun 2011 - 2016

Dari gambaran perkembangan dan pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana Tabel III.1, menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, pada sisi pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif. Kondisi demikian ikut mempengaruhi sisi pengeluaran daerah. Disamping pendapatan yang menjadi kekuatan sumber pendapatan daerah Kota Ambon, maka penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, meskipun tidak terlalu menonjol, juga ikut berkontribusi bagi APBD Kota Ambon. Kedua pos ini untuk menjaga keseimbangan yang anggaran daerah baik, terhadap surplus maupun defisit anggaran.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan dari sejauhmana pemerintah daerah mampu untuk memaksimalkan potensi sumberdayanya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas serta partisipatif, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Selama tahun 2011-2016, Pemerintah Kota Ambon telah berupaya memaksimalkan seluruh potensi sumberdaya, khususnya sumberdaya keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, manata manajemen organisasi pemerintah kota, meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur untuk menunjang aktivitas masyarakat serta berbagai kebijakan pembangunan lainnya. Untuk mendukung kebijakan program pembangunan di Kota Ambon tersebut, langkah awal yang dilakukan yakni menata sistem manajemen pengelolaan APBD Kota Ambon.

Pada awal pemerintahan tahun 2011-2016, kondisi keuangan pemerintah Kota Ambon Tahun 2011 berada dalam keadaan defisit. Namun realitas menunjukkan bahwa menjelang berakhirnya tahun 2016, kondisi keuangan pemerintah Kota Ambon menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif, karena terjadi surplus sebesar Rp.35.009.058.051,-. Dinamika manajemen keuangan yang cukup positif ini, dipicu oleh kebijakan alokasi pembiayaan yang berbasis kinerja, manajemen pengelolaan anggaran daerah yang mulai tertata dan lebih transparansi, serta akuntabilitas dalam mengelola APBD setiap tahun.

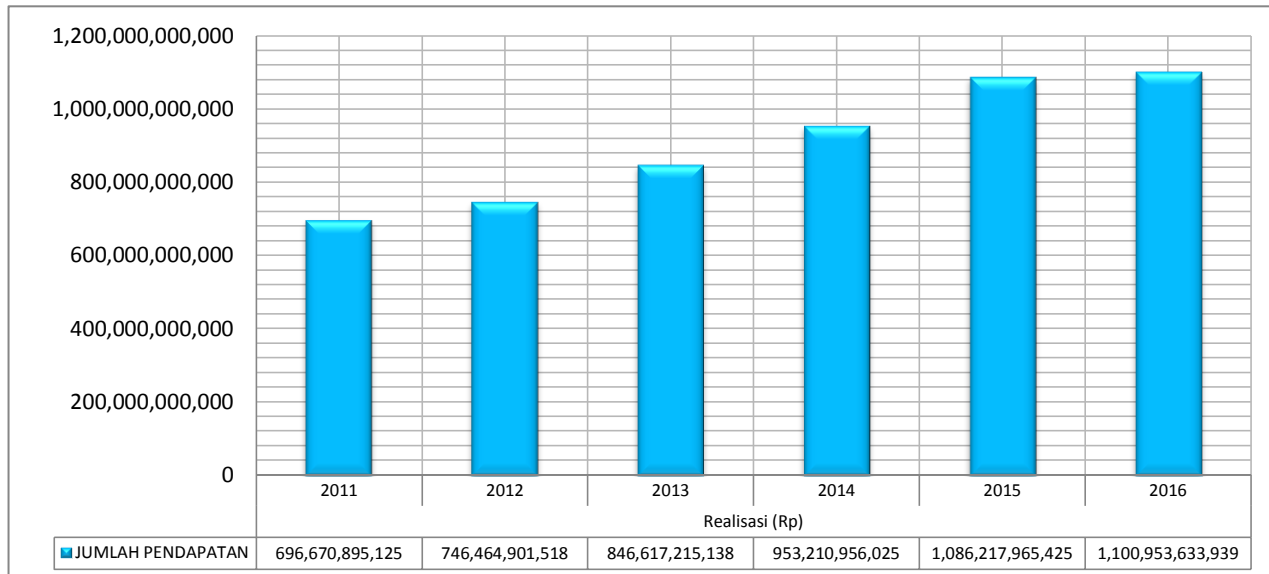
3.1.1.1 Pendapatan Daerah.

Amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menjadi peluang bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pendatapan Asli Daerah(PAD), sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Disamping potensi pengelola PAD sebagai sumber pendapatan daerah, pemerintah pusat maupun provinsi juga memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan

pendapatan daerah melalui bantuan Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan. Seluruh pendapatan tersebut tercatat melalui rekening umum kas daerah, untuk menambah ekuitas dana lancar dan menjadi hak daerah yang harus dimanfaatkan dalam satu tahun anggaran, serta tidak dibayar kembali oleh daerah.

Berbagai kebijakan Pemerintah Kota Ambon selama tahun 2011-2016 untuk mengoptimal sistem penataan dan pengelolaan keuangan daerah, menyebabkan perkembangan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang cukup positif, baik PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan. Berbagai kebijakan regulasi serta optimalisasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ikut berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah.

Dinamika demikian berdampak pada pendapatan daerah Kota Ambon yang pada tahun 2011 baru mencapai Rp.696.633.127.225,-, meningkat menjadi Rp.1.100.953.632.939,- pada tahun 2016 dengan rata-rata pertumbuhan pertahun adalah 9.96%. Realitas inilah menjadi catatan tersendiri, karena pada periode tahun 2011-2016, khususnya sejak tahun 2015, dalam sejarah Pengelolaan Daerah Kota Ambon APBD Kota Ambon, akumulasi keuangan daerah Kota Ambon telah mencapai angka di atas Rp.1 triliun (Gambar III.2 dan Tabel III.2).



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon, 2017

Gambar III.2. Grafik Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ambon
Tahun 2011 - 2016

Prestasi yang baik ini, disebabkan karena adanya regulasi berbagai kebijakan keuangan daerah, sehingga berdampak pada peningkatan

pendapatan daerah, bukan saja berasal dari Dana Perimbangan, namun juga pada pos PAD yang juga menunjukkan peningkatan yang positif. Khusus untuk PAD, pos-pos utama yang ikut memicu pertumbuhan pendapatan daerah, lebih banyak disumbangkan oleh pajak dan retribusi daerah. Meskipun kondisi ini belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan pelayanan di daerah Kota Ambon sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, namun dengan sistem dan manajemen yang baik, pos PAD diprediksi akan terus menunjukkan peningkatan.

Meskipun rata-rata kontribusi PAD per tahun terhadap total pendapatan daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016, baru mencapai 10,25%, namun dengan sistem dan manajemen yang semakin baik, pemerintah Kota Ambon terus berupaya untuk meningkat potensi sumberdayanya bagi peningkatan PAD. Upaya perbaikan kinerja pengelolaan dan penataan manajemen PAD telah nampa sejak tahun 2011. dimana sumbangan PAD hanya sebesar Rp.53.292.765.868,-, meningkat cukup signifikan menjadi Rp.127.227.228.424,- pada tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun adalah 19,84%.

Kontribusi terbesar yang disumbangkan untuk peningkatan PAD Kota Ambon diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp.32.930.258.138,20,- pada tahun 2011, meningkat menjadi Rp.78.545.724.751,- pada tahun 2016 atau bertumbuh rata-rata pertahun sebesar 27,70%. Sementara itu, retribusi daerah yang pada tahun 2011 baru menyumbangkan sebesar Rp.17.072.736.213,-, meningkat menjadi Rp.29.741.800.358,- pada tahun 2016, atau bertumbuh rata-rata pertahun sebesar 14,82%.

Selain kedua sumber utama PAD tersebut, meskipun tidak terlalu menonjol untuk menyumbangkan PAD, masih terdapat 2 sumber pendapatan lainnya yakni hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kedua sumber PAD tersebut, pada tahun 2011 dapat menyumbangkan sebesar Rp.3.327.539.417,-, selanjutnya meningkat menjadi Rp.18.939.653.314,- pada tahun 2016 atau bertumbuh rata-rata pertahun sebesar 93,84%.

Menyikapi perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama PAD masih belum optimal memberi kontribusi bagi pertumbuhan pendapatan daerah, sehingga pemerintah pusat telah berupaya untuk meregulasi kebijakan terhadap desentralisasi fiskal. Upaya ini dilakukan dengan penguatan terhadap pemungutan pajak (*taxing power*) daerah dan transfer daerah. Langkah demikian dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola dan menata potensi sumberdayanya, berupa pajak daerah dan retribusi daerah bagi peningkatan PAD.

Disamping itu untuk Dana Perimbangan (Transfer) daerah, pemerintah terus berupaya meningkatkannya setiap tahun, sebagai konsekuensi kepada daerah untuk melakukan fungsi-fungsi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, sesuai kewenangan yang diserahkan. Sejalan dengan kebijakan transfer ke daerah, pemerintah pusat berupaya meningkatkan transfer Dana Perimbangan kepada pemerintah Kota Ambon, dimana pada tahun 2011, Dana Perimbangan adalah sebesar Rp.634.661.990.357,-, telah meningkat menjadi Rp.973.726.404.515,- pada tahun 2016, atau bertumbuh rata-rata pertahun sebesar 9.04%.

Perhatian pemerintah pusat dengan kebijakan Dana Perimbangan kepada pemerintah Kota Ambon, lebih banyak difokuskan pada Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Dengan tidak mengabaikan sumber-sumber pendapatan lainnya, ternyata kedua sumber dana tersebut sangat berpengaruh bagi peningkatan pendapatan daerah.

Dana Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2011, baru mencapai Rp.486.012.992.595,-, meningkat menjadi Rp.908.810.346.115,- pada tahun 2016, atau bertumbuh rata-rata pertahun sebesar 17,40%. Pos ini diperoleh dari bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer pemerintah sejak tahun 2011-2016 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, alokasi DAU baru mencapai Rp.411.137.994.000,-, namun pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp.686.184.418.000,- atau bertumbuh rata-rata pertahun sebesar 13,38%. Untuk bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 juga menunjukkan peningkatan yang positif. Pada Tahun 2016, DAK baru mencapai Rp.36.719.800.000,- sedikit menurun pada tahun 2012 dan tahun 2014, namun gejala peningkatan terus nampak sehingga pada tahun 2016 menjadi Rp.191.672.743.075,- dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 50,33%.

Di sisi lain, kontribusi pos lain-lain pendapatan yang sah terhadap pendapatan daerah ternyata menunjukkan ketidakkonsistensi dari ketiga sumber pendapatan daerah tersebut. Kondisi demikian dipengaruhi oleh situasi dan perkembangan di daerah. Pada tahun 2011, sumbangan pos lain-lain pendapatan yang sah hanya mencapai Rp.8.678.371.000,-, selanjutnya menunjukkan *trend* menurun setiap tahun, malahan pada tahun 2016 pemerintah Kota Ambon tidak mendapat alokasi bantuan dari pos ini. Pada tahun 2015 realisasi pendapatan hanya sebesar Rp.7.854.996.563,-, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun dalam kondisi negatif, yakni minus 1,90%.

**Tabel III.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ambon
Tahun 2011 - 2016**

No.	Uraian	Tahun						Ratar-Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	53.292.765.868	58.252.561.996	66.174.084.704	98.882.344.129	114.626.808.177	127.227.228.424	19,84
1.1.1	Pajak Daerah	32.930.258.138	39.299.981.688	44.982.635.424	62.895.216.195	74.838.322.350	78.545.724.751	
1.1.2	Retribusi Daerah	17.072.736.213	15.936.944.023	17.660.700.927	28.190.177.188	27.627.181.727	29.741.850.358	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	281.524.139	437.705.403	525.035.726	1.260.730.456	-	3.107.621.149	
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.008.247.378	2.577.930.881	3.005.712.627	6.636.220.290	12.161.304.100	15.832.032.165	
1.2	DANA PERIMBANGAN	634.661.990.357	687.299.283.552	781.169.168.494	847.512.843.896	962.824.527.001	973.726.404.515	9,04
1.2.1	Dana Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	479.967.392.990	570.241.667.881	636.119.699.432	684.451.836.379	736.046.707.831	908.810.346.115	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	31.187.658.233	42.107.852.446	34.163.447.779	35.863.961.171	21.713.976.300	30.319.949.601	
1.2.1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumberdaya Alam)	921.940.757	1.525.403.435	916.740.653	1.515.556.208	1.915.271.531	633.235.439	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	411.137.994.000	497.388.862.000	551.507.941.000	601.627.489.000	620.624.670.000	686.184.418.000	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	36.719.800.000	29.219.550.000	49.531.570.000	45.444.830.000	91.792.790.000	191.672.743.075	

Lanjutan Tabel III.2.

No.	Uraian	Tahun						Ratar-Rata Pertumbuhan (%)
		2011	(9)	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(9)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	135.860.839.360	91.752.437.000	117.997.096.000	134.394.671.000	176.738.450.000	21.659.798.000	
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	135.860.839.360	91.752.437.000	117.997.096.000	134.394.671.000	176.738.450.000	21.659.798.000	
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	18.833.758.007	25,305.178.671	27.052.373.062	28.666.336.517	47.539.369.170	43.256.260.400	
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.833.758.007	25,305.178.671	27.052.373.062	28.666.336.517	.47.539.369.170	21.659.798.000	
1.2.4	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	2.500.000.000	-	
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	-	-	-	-	2.500.000.000	-	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	8.678.371.000	913.055.970	1.269.461.940	6.815.768.000	7.786.065.969	-	79,84
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.678.371.000	-	-	-	-	-	
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	259.961.940	-	7.786.065.969	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	913.055.970	1.009.500.000	6.815.768.000	-	-	
JUMLAH PENDAPATAN		696.633.127.225	746.464.901.518	848.612.715.138	953.210.956.025	1.085.237.401.147	1.100.953.632.939	9,96

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon, 2017

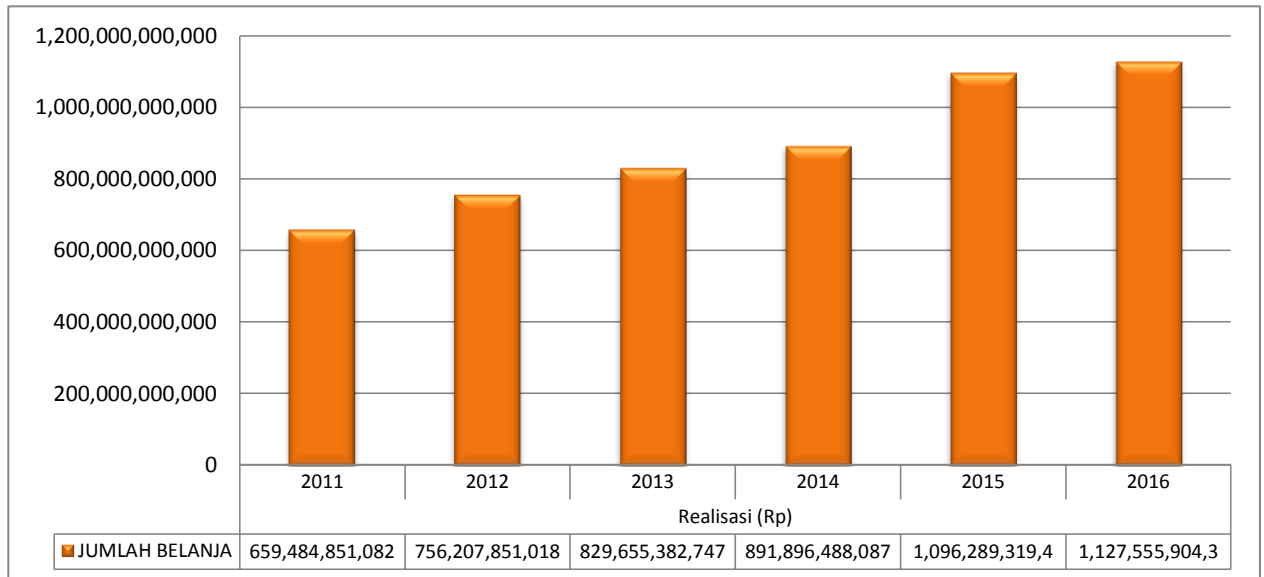
3.1.1.2 Belanja Daerah.

Data historis tentang perkembangan kebijakan belanja daerah Kota Ambon untuk periode lima tahun sebelumnya akan dianalisis untuk digunakan dalam menentukan kebijakan belanja di masa yang akan datang. Kajian-kajian secara komprehensif terhadap seluruh kebijakan anggaran belanja daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan berbagai program pembangunan daerah. Ini penting, karena belanja daerah adalah seluruh pengeluaran yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kebutuhan mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Ambon yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Ambon merupakan segala urusan terkait dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sementara Urusan Pilihan merupakan urusan pemerintahan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi keunggulan daerah. Dengan demikian belanja daerah wajib dimanfaatkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Karena itu, belanja daerah bertujuan untuk menjawab kebutuhan pelaksanaan program pembangunan daerah pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Ambon.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka belanja daerah harus dirinci menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan dengan berbagai indikator capaiannya. Sehubungan dengan itu, struktur belanja daerah dapat dibedakan dalam 4 kelompok besar yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Transfer.

Historis proporsi realisasi belanja daerah Kota Ambon selama tahun 2011-2016 terus menunjukkan peningkatan ke arah yang positif. Pada tahun 2011, realisasi belanja daerah Kota Ambon baru sebesar Rp.659.484.921.082,- meningkat menjadi Rp.1.127.555.904.387,- pada tahun 2016, atau bertumbuh rata-rata pertahun sebesar 11,53%. Gambaran realisasi belanja daerah secara rinci selama tahun 2011-2016, adalah sebagaimana Gambar III.3 dan Tabel III.3.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon, 2017

Gambar III.3 Grafik Realisasi Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016

Komponen belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer (Tabel III.3). Komponen Belanja Operasi adalah belanja tidak langsung serta tidak memiliki korelasi atau terkait dengan pelaksanaan program atau kegiatan namun cukup besar menyerap anggaran belanja pemerintah Kota Ambon. Kondisi demikian terjadi karena belanja Belanja Operasi lebih dititikberatkan dan terfokus pada peningkatan serta perbaikan kesejahteraan pegawai melalui kompensasi gaji dan tunjangan serta penghasilan, pembayaran utang bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Pengeluaran belanja daerah Kota Ambon untuk kebutuhan Belanja Operasi sejak tahun 2011-2016 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 realisasi pengeluaran daerah untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp.554.292.398.634,-, meningkat menjadi Rp.928.476.213.147,- pada tahun 2016, atau bertumbuh rata-rata pertahun 10,99%.

Kontribusi terbesar yang ikut memengaruhi Belanja Operasi adalah belanja pegawai yang meningkat setiap tahun, dimana tahun 2011 adalah sebesar Rp.451.729.656.157,- menjadi sebesar Rp.663.918.067.265,- pada tahun 2016, atau bertumbuh rata-rata pertahun sebesar 9,39%. Sementara itu, penyerapan anggaran paling terendah adalah belanja subsidi, yang tetap konstan selama tahun 2011-2014 sebesar Rp.100.000.000,-. Pos ini meskipun meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp.917.537.398,-, namun

mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi Rp.400.000.000,-, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun adalah sebesar 60%.

Belanja Modal adalah pengeluaran daerah yang dimanfaatkan untuk menambah nilai aset daerah berupa belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; serta belanja aset tetap lainnya. Realisasi Belanja Modal pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.97.459.833.541,- dan terus mengalami peningkatan menjadi Rp.195.522.477.888,- pada tahun 2016, atau bertumbuh rata-rata per tahun sebesar 16,24%.

Meskipun sangat variatif, akan tetapi realisasi pengeluaran terbesar dari 5 pos Belanja Modal lebih banyak diserap oleh 3 pos yakni; (1) belanja peralatan dan mesin; (2) belanja bangunan dan gedung, serta (3) belanja jalan, irigasi dan jaringan. Untuk 2 pos belanja lainnya yakni belanja tanah dan belanja aset tetap lainnya, perkembangan realisasi pengeluarannya sangat variatif dan tidak konstan setiap tahun.

Belanja peralatan dan mesin, terealisasi pada tahun 2011 sebesar Rp.13.068.335.377,-, dan meningkat hingga tahun 2016 menjadi sebesar Rp.33.912.906.196,-, atau bertumbuh rata-rata per tahun 31,30%. Belanja bangunan dan gedung, terealisasi pada tahun 2011 sebesar Rp.23.222.995.965,- dan meningkat menjadi Rp.44.764.307.644,- pada tahun 2016, atau bertumbuh rata-rata per tahun sebesar 18,52%. Belanja jalan, irigasi dan jaringan terealisasi tahun 2011 sebesar Rp.53.331.889.899,-, dan meningkat menjadi sebesar Rp.106.300.609.235,- pada tahun 2016, atau bertumbuh rata-rata per tahun sebesar 19,86%.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran daerah yang dimanfaatkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, atau di luar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Ambon. Hal-hal penting yang menjadi prioritas belanja tidak terduga, antara lain bencana/tanggap darurat, kondisi yang mendesak serta kebijakan yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Karena disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan di daerah, selama tahun 2011-2016, realisasi Belanja Tidak Terduga nampaknya tidak konstan. Pada tahun 2011, realisasi Belanja Tidak Terduga adalah sebesar Rp.7.732.688.907,-, namun pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar Rp.3.557.213.350,-, dimana pertumbuhannya menunjukkan angka yang negatif, yakni rata-rata per tahun sebesar minus 11,53%.

Khusus untuk kebijakan Transfer, hal ini baru di mulai pada tahun 2015, karena terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa. Olehnya itu daerah berkewajiban melakukan bantuan

keuangan bagi desa/negeri sesuai kebutuhan pemanfaatan dana sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan peundang-undangan.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah.

Realisasi pos pembiayaan daerah untuk kebutuhan komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan terus menunjukkan peningkatan. Bila pada tahun 2011 realisasi pembiayaan masih negatif dengan defisit anggaran sebesar Rp.14.216.294.066,-, namun dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon melalui penataan manajemen pengelolaan keuangan, maka pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp.92.793.832.784,-. Peningkatan pembiayaan ini terjadi pada 2 sumber utama yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka komponen pembiayaan penerimaan adalah semua jenis penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sementara komponen pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

**Tabel III.3
Realisasi Belanja Daerah Kota Ambon
Tahun 2011 – 2016**

No.	Uraian	Tahun						Ratar-Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(09)
2	BELANJA DAERAH	659.484.921.082	756.207.851.019	829.655.382.747	891.896.488.087	1.096.289.319.436	1.127.555.904.387	11,53
2.1	BELANJA OPERASI	554.292.398.634	640.104.457.411	719.193.534.309	759.420.038.922	866.639.434.221	928.476.213.147	10,99
2.1.1	Belanja Pegawai	451.729.656.157	534.338.242.668	584.287.722.269	598.038.376.825	654.583.092.568	663.718.067.265	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	72.789.066.370	92.128.533.922	119.428.924.926	132.966.730.670	184.460.431.674	221.372.191.232	
2.1.3	Belanja Bunga	345.555.556	781.645.091	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	917.537.398	400.000.0000	
2.1.5	Belanja Hibah	18.742.439.773	6.515.115.901	9.884.427.689	13.642.321.077	20.487.211.581	33.985.303.200	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.931.358.957	2.812.719.830	3.430.149.425	12.340.292.100	6.191.161.000	9.000.651.450	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	3.654.321.821	3.428.200.000	2.062.310.000	2.332.315.250	-	-	
2.2	BELANJA MODAL	97.459.833.541	111.310.861.390	105.037.351.996	129.990.393.365	189.110.622.775	195.522.477.888	16,24
2.2.1	Belanja Tanah	953.000.000	1.790.482.900	938.500.000	3.720.369.000	3.227.243.100-	7.528.450.700	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	13.068.335.377	22.466.108.425	24.383.648.417	21.463.327.451	36.458.617.613	33.912.906.196	
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	23.222.995.965	57.130.374.345	40.323.169.179	52.846.246.877	58.358.858.548	44.764.307.644	

Lanjutan Tabel III.3

No.	Uraian	Tahun						Ratar-Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.331.889.899	29.573.241.970	28.149.562.600	48.303.164.700	89.847.428.295	106.300.609.253	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.883.612.300	350.653.750	3.242.471.800	3.657.385.337	1.218.475.219	3.016.204.095	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.732.688.907	4.792.532.217	5.424.496.442	2.486.055.800	2.444.225.000	3.557.213.350	(8,01)
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7.732.688.907	4.792.532.217	5.424.496.442	2.486.055.800	2.444.225.000	3.557.213.350	
2.4	TRANSFER	-	-	-	-	13.063.027.440	31.182.503.285	27,74
2.4.1	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	-	-	-	-	13.063.027.440	31.182.503.285	
2.4.1.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-	-	-	-	12.512.690.190	30.332.840.535	
2.4.1.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	550.337.250	849.662.750	
JUMLAH BELANJA		659.484.921.082	756.207.851.019	829.655.382.747	891.896.488.087	1.096.289.319.436	1.127.555.904.387	11,53
SURPLUS/DEFISIT		37.186.044.042	(9.742.948.500)	18.961.832.391	61.314.467.938	(10.071.354.011)	(57.784.794.732)	31,97
3	PEMBIAYAAN	(14.216.294.066)	20.494.854.637	5.756.905.137	22.016.744.960	79.284.990.979	92.793.832.784	(2,46)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.639.558.698	33.357.285.268	10.756.905.137	24.713.737.528	84.743.296.645	94.676.536.437	120,14
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	8.639.558.698	22.124.535.268	10.756.905.137	24.713.737.528	84.743.296.645	94.676.536.437	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	--	-	-	

Lanjutan Tabel III.3

No.	Uraian	Tahun						Ratar-Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(09)
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	11.232.000.000	-	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	750.000	-	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.855.852.764	12.862.430.631	5.000.000.000	2.696.992.567	4.046.221.919	1.625.000.000	(30,87)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	1.000.000.000	5.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	1.625.000.000	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	22.855.852.764	11.232.000.000	-	196.992.567	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	1.546.221.910	-	
3.2.5	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	-	630.430.631	-	-	-	-	
PEMBIAYAAN NETO		(14.216.294.066)	20.494.854.637	5.756.905.137	22.016.744.960	79.284.990.979	92.793.832.784	48,84
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		22.931.999.976	10.751.905.137	24.713.737.528	83.331.212.895	69.213.636.967	35.009.058.051	49,51

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon, 2017

3.1.2 Neraca Daerah.

Neraca daerah merupakan bagian dari laporan keuangan daerah yang harus dibuat dan disiapkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam rangka pengelolaan potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh daerah. Bila mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan untuk menata manajemen pemerintah daerah.

Penyusunan neraca daerah sebagai salah satu bentuk laporan keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan keuangan pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan dan digunakan bagi kepentingan analisis rasio keuangan APBD. Selain itu, penyusunan necara daerah juga sangat bermanfaat agar dapat membandingkan kemampuan capaian hasil terhadap pelaksanaan kinerja APBD setiap periode.

Secara hirarki daerah telah diberikan kewenangan dalam menata dan mengelola potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki, agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menambah dan meningkat aset daerah. Potensi daerah seperti tanah, bangunan dan gedung, berbagai peralatan kantor, jalan, kendaraan dan berbagai fasilitas lain yang bernilai ekonomis dan dimiliki oleh pemerintah Kota Ambon, perlu terdata secara baik karena dapat meningkatkan aset daerah.

Dinamika pengorganisasian kelembagaan pemerintah Kota Ambon ikut berdampak terhadap penambahan dan peningkatan nilai aset. Penambahan aset dalam kurun waktu 2012-2016, turut meningkatkan total nilai aset yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Kota Ambon.

Kondisi objektif dari total nilai aset pemerintah Kota Ambon (Tabel III.4) adalah mencapai Rp.1.025.920.000.090,- pada tahun 2011. Akan tetapi meskipun proses penataan dan pengelolaan aset belum maksimal, ternyata dapat nilai aset pada tahun 2016 menjadi Rp.1.416.885.040.614,- dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,48%. Pertambahan nilai aset ini lebih banyak disumbangkan dari investasi jangka panjang yang memiliki nilai manfaat baik ekonomi maupun sosial dan dapat diukur dengan uang, antara lain; tanah, gedung dan bangunan, peralatan kantor, alat angkutan serta fasilitas lainnya.

Tabel III.4
Neraca Daerah dan Pertumbuhan Neraca Kota Ambon
Tahun 2011 – 2016

No.	Uraian	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	ASET							
1.1	ASET LANCAR							
1.1.1	Kas	22.124.535.268	10.751.905.137	25.044.903.274	83.904.110.419	94.262.689.879	34.203.450.207	
	Kas di Kas Daerah	20.558.909.279	7.481.818.609	24.324.113.675	83.152.070.649	92.830.884.893	33.539.988.595	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.565.625.989	3.270.086.528	720.789.599	722.221.770	1.427.987.986	616.353.162	
	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	29.818.000	3.817.000	47.108.450	
	Investasi Jangka Pendek	2.867.150.407	11.356.478.405	6.062.647.610	8.372.994.509	-	-	
	Piutang			-	-	-	66.597.730.471	
	Piutang Pajak	1.778.253.102	9.461.669.300	3.025.111.730	6.511.247.030	49.301.582.542	-	
	Piutang Retribusi	440.360.550	1.246.272.350	2.377.299.125	1.201.510.724	3.200.407.470	-	
	Piutang Lain-Lain	648.536.755	648.536.755	660.236.755	660.236.755	660.236.755	3.612.330.207	
	Piutang DAK	-	-	-	-	-	-	
	Piutang DAU	-	-	-	-	-	-	
	Belanja Dibayar Di muka	-	-	-	-	-	-	
	Persediaan Barang Habis Pakai	4.035.022.287	3.858.380.926	4.581.419.756	5.387.928.449	5.915.826.393	7.411.591.969	
	JUMLAH ASET LANCAR	29.026.707.962	25.966.764.468	35.688.970.640	97.665.033.378	119.640.128.409	58.423.025.376	9,62
	Investasi Jangka Panjang		9.193.649.166	20.208.169.923	22.708.169.923	13.951.000.000	18.219.284.330	
	Investasi Non Permanen		2.455.620.000	-	-	-	-	
	Dana Bergulir	2.463.620.000	2.455.620.000	-	-	-	-	
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	2.463.620.000	9.193.649.166	20.208.169.923	22.708.169.923	13.951.000.000	18.219.284.330	

Lanjutan Tabel III.4

No.	Uraian	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Investasi Permanen	5.738.029.166	6.738.029.166	20.208.169.923	22.798.169.923	13.951.000.000	1.625.000.000	
	PT. Bank Maluku dan Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	
	PDAM Kota Ambon	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Investasi Permanen	5.738.029.166	6.738.029.166	20.208.169.923	22.798.169.923	13.951.000.000	1.625.000.000	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		8.201.649.166	9.193.649.166	20.208.169.923	22.708.169.923	13.951.000.000	1.625.000.000	-13,93
1.2	ASET TETAP							
1.2.1	Tanah	196.325.596.281	198.369.387.151	199.307.887.151	203.028.256.151	206.255.499.251	200.286.673.251	
	Peralatan dan Mesin	138.900.247.302	158.863.127.557	178.360.477.474	200.676.685.225	237.779.996.016	275.584.633.779	
	Alat-Alat Angkutan (Kendaraan)	-	-	-	-	-	-	
	Meubeler dan Perlengkapan	-	-	-	-	-	-	
	Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	
	Alat-Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	
	Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	
	Gedung dan Bangunan	396.463.614.415	323.010.250.117	365.529.341.610	444.517.222.929	507.100.186.792	550.696.609.041	
	Jalan, Jaringan dan Instalasi	352.384.657.775	382.440.492.825	408.706.346.925	457.621.261.525	530.911.449.270	650.210.858.065	
	Aset Tetap Lainnya	20.514.483.468	20.840.137.218	24.082.609.018	27.591.044.355	28.809.519.574	31.704.093.169	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.982.010.300	54.362.393.790	83.206.895.773	55.919.981.131	68.623.629.124	88.834.048.932	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-	(441.198.182.056)	(491.391.869.670)	
JUMLAH ASET TETAP		912.246.013.260	1.137.885.788.658	1.259.193.557.951	1.389.354.451.316	1.138.282.097.971	1.305.925.046.568	2,70

Lanjutan Tabel III.4

No.	Uraian	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-	
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-	0,00
	ASET LAINNYA		9.081.556.530	18.649.895.030	15.593.962.930	15.593.962.930	34.317.684.340	
	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-	
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	231.993.530	231.993.530	231.993.530	231.993.530	-	-	
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	
	Aset Lain-Lain	-	8.829.563.000	18.417.901.500	12.376.559.400	12.376.559.144	13.778.028.810	
	JUMLAH ASET LAINNYA	231.993.530	9.081.556.530	18.649.895.030	15.593.962.930	15.593.962.930	34.317.684.340	27,09
	TOTAL ASET	1.025.920.960.090	1.182.107.758.823	1.333.740.593.545	1.525.321.617.548	1.287.467.189.309	1.416.885.040.614	3,48
2	KEWAJIBAN		22.469.609.318	4.150.152.653	3.672.841.360	6.794.566.311	-	
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	15.328.821	22.216.122.411	331.165.746	572.897.521	396.847.475	144.440.325-	
	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-	
	Utang Pajak	-	-	-	-	-	-	
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	
	Pendapatan Diterima Di muka	-	-	-	-	-	79.166.666	
	Utang Jangka Pendek Lainnya	259.754.324	-	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	275.083.145	22.216.122.411	338.665.746	580.397.521	5.248.344.392	223.606.991	-78,72

Lanjutan Tabel III.4

No.	Uraian	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
	Utang Dalam Negeri	332.820.240	253.486.907	253.486.907	-	1.546.221.919	-	
	Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	
	Utang Jangka panjang lainnya	343.379.252						
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	676.199.492	253.486.907	3.811.486.907	3.092.443.839	1.546.221.919	589.182.544	-2,91
	TOTALKEWAJIBAN	951.282.637	22.469.609.318	4.150.152.653	3.672.841.360	6.794.566.311	46.093.512.764	-60,59
3	EKUITAS DANA							
3.1	EKUITAS DANA LANCAR							
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	22.124.535.268	10.751.905.137	24.713.737.528	83.331.21.899	-	-	
	Pendapatan Yang Ditanggguhkan		-	-	-	-	-	
	Cadangan Untuk Piutang	2.867.150.407	11.640.941.935	6.062.647.610	8.372.994.510	-	-	
	Cadangan Untuk Persediaan	4.035.022.287	3.858.380.926	4.581.419.756	5.387.928.449	5.915.826.393	7.411.591.969	
	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(275.083.145)	(22.216.122.411)	(7.500.000)	(7.500.000)	-	-	
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	28.751.624.818	4.035.105.587	35.350.304.894	97.084.635.857	-	-	-2,96

Lanjutan Tabel III.4

No.	Uraian	Tahun						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI					-	-	
	Dinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	8.201.649.166	9.193.649.166	20.208.169.923	22.708.169.923	-	-	
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	988.460.609.431	1.137.885.788.658	1.263.792.441.451	1.389.354.451.316	-	-	
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	231.993.530	9.346.020.060	14.051.011.530	15.593.962.930	-	-	
	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(676,199.493)	(253.486.907)	(3.811.486.907)	(3.092.443.839)	-	-	
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	996.210.052.634	1.155.887.507.448	1.294.240.135.998	1.424.564.140.331	-	-	-29,83
	EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-	
	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.024.961.677.452	1.159.638.149.505	1.329.590.440.892	1.521.648.776.188	1.280.672.622.999	1.370.791.537.846	-21,91
	JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA	1.025.920.960.090	1.182.107.758.823	1.333.740.593.545	1.525.321.617.548	1.287.467.189.310	1.416.885.040.614	3,48

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon, 2017

Dari uraian neraca daerah pemerintah Kota Ambon sebagaimana Tabel III.4 di atas, menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan nilai aset daerah sangat fluktuasi sejak tahun 2011, namun tetap menunjukkan peningkatan di tahun 2016. Pertumbuhan nilai aset lancar menunjukkan kondisi yang cukup baik, dimana pada tahun 2011 adalah mencapai Rp.29.026.707.962,-, bertambah menjadi Rp.58.423.025.376,- pada tahun 2016, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,62%.

3.1.2.1 Rasio Likuiditas.

Kajian analisis rasio likuiditas terhadap rasio lancar pemerintah Kota Ambon sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 (Tabel III.5), ternyata menunjukkan peningkatan yang sangat positif. Pada tahun 2011, rasio lancar mencapai 104,52; menurun pada tahun 2012 menjadi 0,17; serta tahun 2015 menjadi 21,80; sementara di tahun 2016 meningkat cukup signifikan menjadi 260,28.

Dengan kondisi yang cukup positif ini memberikan ruang kepada pemerintah Kota Ambon untuk memanfaatkan aset lancar bagi kepentingan membayar seluruh hutang maupun kewajiban jangka pendek. Hal penting yang harus diperhatikan dan diantisipasi adalah bila nilai rasio semakin kecil, dapat berimplikasi, asi terhadap kemampuan pemerintah Kota Ambon untuk menyelesaikan kewajiban hutang jangka pendeknya. Untuk itu perlu diantisipasi agar jumlah aset lancar harus dipertahankan dan pembayaran utang jangka pendek harus dimaksimalkan.

Meskipun pada tahun 2012 dan tahun 2015 menunjukkan gejala yang kurang positif terhadap neraca keuangan pemerintah Kota Ambon, akan tetapi rasio *quik* dapat dikatakan masih lebih akurat bila dibandingkan dengan rasio lancar. Dari kajian analisis terhadap rasio *quik*, ternyata kondisi tahun 2011 adalah bernilai 89,85, namun pada tahun 2012 kondisinya cukup memprihatinkan karena rasio tersebut memiliki nilai negatif yakni minus 0,005. Hal yang sama pun terjadi pada tahun 2015, meskipun tidak menunjukkan angka negatif, tetapi sudah semakin baik, dengan angka dalam kisaran 20,67.

Hasil kajian rasio *quik* terhadap necara daerah Kota Ambon tahun 2016 terjadi peningkatan cukup positif yakni 227,13 dibandingkan dengan tahun 2012. Peningkatan yang cukup positif ini menunjukkan bahwa aset lancar setelah dikurangi dengan persediaan, mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Ambon mampu melunasi kewajiban jangka pendek sebesar 227,13 kali bila dibandingkan dengan tahun 2011.

Tabel III.5. Rasio Likuiditas Kota Ambon Tahun 2011 - 2016

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Lancar	104,52	0,17	104,38	167,27	21,80	260,28
2	Rasio Quik	89,85	-0.005	90,85	157,99	20,67	227,13

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon, 2017

3.1.2.2. Rasio Solvabilitas.

Untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah Kota Ambon dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya, maka kajian atau pendekatan yang dilakukan yakni menggunakan perhitungan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas yang digunakan untuk neraca keuangan daerah adalah dengan menganalisis terhadap aset yakni kewajiban dibagi dengan aset; serta rasio kewajiban terhadap ekuitas yakni kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Rasio total hutang terhadap total aset berada dalam kondisi yang sangat fluktuasi (Tabel III.6). Pada tahun 2011, kondisi rasio tersebut berada dalam kisaran 0,09%, dan beranjak meningkat menjadi 3,25% pada tahun 2016. Dengan meningkatnya rasio solvabilitas, menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran (belanja) daerah yang meningkat tersebut, lebih banyak berasal dari pinjaman. Dan bila hal ini terus terjadi menunjukkan bahwa semakin rendahnya kemampuan pemerintah Kota Ambon untuk melunasi kewajibannya. Sebaliknya bila rasio solvabilitas semakin menurun, menunjukkan bahwa pemerintah Kota Ambon mampu untuk melunasi kewajibannya. Hal ini disebabkan karena aset pemerintah Kota Ambon semakin bertambah, serta mampu menjamin atau cukup besar nilainya untuk menutup seluruh utang dengan modal yang dimiliki.

Bila rasio total hutang terhadap total aset menggambarkan kondisi objektif yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Ambon untuk memanfaatkan aset dalam melunasi kewajibannya, maka rasio kewajiban terhadap modal menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah Kota Ambon untuk melunasi kewajibannya.

Tabel III.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio hutang (kewajiban) adalah 0,09%, kemudian meningkat menjadi 3,26% di tahun 2016. Dengan total hutang yang cukup positif, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan atau modal pemerintah Kota Ambon dapat digunakan membayar hutang kepada kreditor atau pihak ketiga, bila berkeinginan untuk melakukan pinjaman di masa yang akan datang.

Tabel III.6. Rasio Solvabilitas Kota Ambon Tahun 2011 - 2016

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset (%)	0,09	1,90	0,31	0,24	0,53	3,25
2	Rasio Hutang Terhadap Modal (%)	0,09	1,94	0,31	0,24	0,53	3,26

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hirarki kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang terstruktur dan tercantum dalam batang tubuh APBD. Prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperhatikan yakni menjaga keseimbangan antara pendapatan daerah, dan efisiensi serta efektivitas belanja atau pengeluaran daerah, dengan memanfaatkan serta memaksimal seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah Kota Ambon.

3.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Disadari sungguh bahwa dengan memiliki potensi sumberdaya yang terbatas pemerintah Kota Ambon terus berupaya untuk menata kebijakan keuangan daerah agar seoptimal mungkin dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan di daerah. Menyikapi semakin meningkatnya kebutuhan belanja daerah, pemerintah Kota Ambon terus menempuh langkah-langkah untuk mendukung kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.

3.2.1.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah.

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya pemerintah Kota Ambon meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, dengan memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari PAD.

Langkah-langkah kebijakan strategis yang dilakukan, antara lain; (1) peningkatan kemampuan dan optimalisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pendapatan daerah; (2) penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pungutan pajak dan retribusi daerah; (3) pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi daerah; (4) rehabilitasi dan penataan sarana serta fasilitas pungut; (5) pengawasan dan evaluasi terhadap tanggung jawab wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah; serta (6) meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dana perimbangan.

3.2.1.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada prinsipnya memberi ruang dan kewenangan kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Menyambut amanat Undang-Undang tersebut, pemerintah Kota Ambon telah melakukan langkah-langkah ekstensifikasi dengan memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah. Perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan sejalan dengan perubahan dan penambahan defenisi subjek dan objek pajak daerah serta retribusi daerah.

Langkah-langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon ikut memengaruhi peningkatan pendapatan daerah sejak tahun 2011-2016. Hal tersebut tercermin dengan kondisi riil peningkatan pendapatan daerah yang menunjukkan angka positif baik itu bersumber dari PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

3.2.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah Kota Ambon. Dengan demikian kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menuntaskan agenda penting seperti kebersihan, penerangan jalan umum, transportasi maupun pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Alokasi anggaran juga tetap diprioritaskan guna membiayai bidang-bidang pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan untuk menambah nilai aset (belanja modal) Kota Ambon.

Disamping alokasi pembiayaan untuk membiayai berbagai program prioritas, kebijakan pembiayaan daerah juga terfokus pada belanja operasi. Alokasi belanja operasi memiliki porsi yang cukup besar yakni, rata-rata dalam kisaran 84,50% dari total belanja daerah, dan dimanfaatkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan.

3.2.3 Proporsi Penggunaan Anggaran.

Struktur APBD Kota Ambon sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan bahwa proporsi belanja operasi menyerap anggaran yang sangat besar, dan tidak sebanding dengan kebutuhan belanja modal yang bersinggungan langsung dengan pemberdayaan masyarakat atau sektor publik. Meningkatnya penyerapan anggaran yang cukup besar pada belanja operasi perlu ditinjau lagi, karena sangat berpengaruh pada kebutuhan pembiayaan belanja modal dalam menambah aset daerah.

Dinamika penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum menuntut dukungan sumberdaya dan pembiayaan yang cukup besar. Dalam kondisi yang demikian, selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, perhatian pemerintah Kota Ambon dalam mengalokasikan belanja daerah lebih besar untuk belanja operasi. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2016 yakni sebesar 82,34%, dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 84,05%, ternyata belanja operasi tetap mendapat porsi yang cukup tinggi dari total belanja daerah pemerintah Kota Ambon. Sedangkan untuk belanja modal maupun belanja tak terduga, realisasi tahun 2011 adalah sebesar 15,95%, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 17,66%.

Meskipun menurun pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2011, akan tetapi tingginya realisasi belanja operasi disebabkan karena beban pembiayaan untuk gaji dan kesejahteraan pegawai negeri. Jika pada tahun 2011, pos belanja pegawai ini mencapai 81,50% dari total belanja operasi, namun menurun menjadi 71,48% di tahun 2016. Proporsi belanja barang dan jasa adalah sebesar 13,13% pada tahun 2011, meningkat menjadi 33,35% di tahun 2016; sementara sisanya untuk kebutuhan belanja lainnya.

Belanja modal yakni pengeluaran bagi kebutuhan program dan kegiatan yang akan menambah nilai aset daerah. Realisasi belanja modal pada tahun 2011 adalah sebesar 14,78%, meningkat menjadi 17,34% pada tahun 2016. Serapan dana belanja modal adalah belanja bangunan dan gedung, yang pada tahun 2011 adalah sebesar 23,83% dari total pengeluaran belanja modal, namun menurun pada tahun 2016 menjadi 22,89%; serta belanja jalan, jaringan dan irigasi yang tahun 2011 adalah sebesar 54,72%, namun juga menurun menjadi 54,37% pada tahun 2016. Selain itu, belanja modal digunakan pula untuk belanja peralatan dan mesin yang pada tahun 2011 sebesar 13,41%, meningkat pada tahun 2016 menjadi 17,34%; serta sisanya untuk kebutuhan pembiayaan beberapa kegiatan lainnya yang juga ikut berpengaruh pada belanja modal.

Belanja tidak terduga merupakan bantuan yang sangat terkait dengan perkembangan dan kondisi yang dapat terjadi tanpa diperhitungkan. Meskipun kenyataannya pos ini tidak terlalu besar dalam menyerap anggaran daerah, pada kenyataan juga ikut berpengaruh pada struktur batang tubuh APBD Kota Ambon selama lima tahun.

3.2.4 Analisis Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan merupakan sumber pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan APBD daerah. Penerimaan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari beberapa pos pendapatan yakni SILPA tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang, dan penerimaan hutang.

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari SILPA tahun berkenan, pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal atau investasi.

Baik pos penerimaan pembiayaan daerah maupun pos pengeluaran pembiayaan daerah merupakan pos pembiayaan *netto* serta selisih antara penerimaan daerah dan belanja daerah yang akan diperhitungkan sebagai surplus maupun defisit belanja. Surplus maupun defisit riil daerah, harus diperhitungkan antara realisasi pengeluaran pembiayaan daerah, meliputi penyertaan modal, pembayaran hutang pokok dan pemberian pinjaman daerah, selanjutnya nilai surplus maupun defisit harus diperhitungkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah.

Pengalaman dalam mengelola APBD Kota Ambon sepanjang lima tahun (2011-2016) menunjukkan bahwa berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon untuk menekan angka defisit daerah. Mengatasi kondisi demikian, pemerintah Kota Ambon menempuh langkah dengan mengoptimalkan pos penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Disamping itu juga memaksimalkan sumber penerimaan yang berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah serta penerimaan piutang daerah. Bila kondisi ini dapat dimaksimalkan yang menyebabkan realisasi penerimaan pembiayaan daerah melebihi defisit, dengan sendirinya akan terjadi SILPA untuk tahun berkenan.

Surplus/defisit riil anggaran daerah Kota Ambon selama tahun 2011-2016 adalah sebagaimana Tabel III.7. Perkembangan anggaran daerah pada tahun 2011, tahun 2013 dan tahun 2014 menunjukkan bahwa setelah sisi pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, ternyata APBD Kota Ambon mengalami surplus, sedangkan pada tahun 2012, tahun 2015 dan tahun 2016 menunjukkan kondisi negatif berupa defisit.

**Tabel 3.7
Surplus/Defisit Riil Anggaran Daerah
Kota Ambon Tahun 2011 - 2016**

No	Uraian	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pendapatan Daerah	696.670.895.125	746.464.901.518	846.617.215.138	953.210.956.025	1.086.217.965.425	1.100.953.623.936
	Dikurangi Realisasi;						
2	Belanja Daerah	659.484.851.082	756.207.851.018	829.655.382.747	891.896.488.087	1.096.289.319.436	1.127.555.904.387
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	22.855.852.763	12.862.430.631	5.000.000.000	2.696.992.567	4.046.221.919	1.882.703.653
	Surplus/Defisit Riil	14.330.191.280	(22.605.380.131)	11.961.832.391	58.617.475.371	(14.117.575.930)	(28.484.984.104)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon

Surplus/defisit anggaran dalam tahun anggaran berjalan harus diperhitungkan atau ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah serta penerimaan piutang daerah. Jika ditemui realisasi penerimaan pembiayaan daerah telah melebihi defisit riil anggaran daerah, dengan sendirinya menjadi SILPA tahun berkenan, sehingga anggaran daerah akan terjadi surplus. Tabel III.8 memberikan gambaran secara jelas tentang realisasi penutupan defisit anggaran daerah Kota Ambon tahun 2011-2016.

Pada tahun 2011 penerimaan pembiayaan hanya sebesar Rp.8.601.808.697,-, meningkat menjadi Rp.94.676.536.437,- di tahun 2016 (Tabel III.8). Penerimaan pembiayaan tersebut diperoleh dari SILPA tahun sebelumnya serta pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan ini hanya untuk tahun 2012. Karena terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya serta realisasi defisit riil anggaran yang tidak besar pada tahun 2012, tahun 2015 dan tahun 2016, serta surplus anggaran pada tahun 2013 dan tahun 2014, berdampak pada realisasi SILPA tahun anggaran berkenan, atau pembiayaan *netto* yang terus meningkat, yakni;

- a. Tahun 2011 sebesar Rp.-14.254.044.069,-
- b. Tahun 2012 sebesar Rp.20.494.854.637,-
- c. Tahun 2013 sebesar Rp.5.751.905.137,-
- d. Tahun 2014 sebesar Rp.22.016.744.960,-
- e. Tahun 2015 sebesar Rp.79.284.990.979,-
- f. Tahun 2016 sebesar Rp.92.293.832.784,-

Dengan kondisi SILPA yang terus menunjukkan angka pertumbuhan positif merupakan potensi cukup besar bagi kebutuhan pembiayaan belanja daerah, sekaligus menutup defisit anggaran untuk tahun berikutnya. Pertambahan nilai positif pada SILPA disebabkan karena selain kebijakan efisiensi pengeluaran anggaran lebih ditekankan pada anggaran berbasis kinerja, juga realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan maupun PAD semakin meningkat. Disisi lain SILPA juga disebabkan karena realisasi belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah lebih kecil bila dibandingkan dengan yang dianggarkan.

**Tabel III.8. Komposisi Penutupan Defisit Riil Anggaran Daerah
Kota Ambon Tahun 2011 - 2016**

No	Uraian	Realisasi (Tahun)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	8.601.808.697	22.124.535.268	10.751.905.137	24.713.737.528	83.331.212.898	94.676.536.437
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hsil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	11.232.000.000	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	750.000	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutan Daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan		8.601.808.697	33.357.285.268	10.751.905.137	24.713.737.528	83.331.212.898	94.676.536.437

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon, 2017

3.3 Kerangka Pendanaan.

Reformasi kebijakan perencanaan nasional telah memberi hak otonomi kepada daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi sumberdayanya bagi kepentingan pembangunan daerah demi mensejahterakan masyarakatnya. Kemampuan daerah sebagai wilayah otonom selayaknya sudah harus mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat untuk kebutuhan pembangunan daerah.

Dari gambaran rasio kemandirian daerah, ternyata kebijakan pendanaan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah sesuai kewenangannya, lebih besar diperoleh dari bantuan Dana Perimbangan. Seyogianya ke depan pola ketergantungan ini sudah harus diminimalisir, dengan membuat regulasi kebijakan daerah untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya daerah, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Daerah.

Realisasi belanja daerah adalah pengeluaran periodik wajib dan mengikat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon, dengan menghitung kebutuhan belanja, serta pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat ditunda/dihindari dalam satu tahun anggaran. Karena belanja pengeluaran periodik merupakan pengeluaran wajib untuk dibayar dan tidak dapat ditunda, sehingga daerah harus memperhitungkan secara cermat dalam setiap perencanaan pendanaan. Kebutuhan belanja periodik wajib dan mengikat antara lain: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota Dewan, bunga dan belanja jasa kantor.

Pada Tabel III.9 berikut ini, dengan jelas menggambarkan bahwa belanja wajib dan mengikat pemerintah Kota Ambon. Pada tahun 2011 belanja wajib ini adalah sebesar Rp.494.930.522.774,- dan terus meningkat menjadi Rp.713.971.280.789,- pada tahun 2016, atau rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 7,73%. Pada periode yang sama, belanja periodik untuk belanja operasi di tahun 2011 adalah sebesar Rp.453.368.090.786,-, mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp.667.151.782.671,-, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 8,22%.

Realisasi belanja modal pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.18.706.579.225,-, meningkat menjadi Rp.46.561.794.465,- di tahun 2016 atau rata-rata pertahun sebesar 21,46%. Selain kedua pos belanja di atas, yang turut menyerap anggaran cukup besar juga tak kalah penting adalah pengeluaran pembiayaan. Meskipun pengeluaran pembiayaan tidak konstan, karena pada tahun 2013 dan tahun 2015 tidak terjadi transaksi pada pos ini, akan tetapi tetap menjadi bagian dari pengeluaran daerah.

**Tabel III.9. Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat
Kota Ambon Tahun 2011 - 2016**

No	Uraian	Realisasi (Tahun)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	BELANJA OPERASI	453.368.090.786	537.394.767.758	586.553.362.253	600.310.736.809	661.869.569.752	667.151.782.671
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	451.729.656.157	534.338.242.668	584.287.722.269	598.038.376.825	659.356.369.768	663.718.067.265
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional Walikota/ Wakil Walikota	1.292.879.073	2.274.880.000	2.265.639.984	2.272.359.984	2.513.199.984	3.433.715.406
3	Belanja Bunga	345.555.556	781.645.090	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil						
B	BELANJA MODAL	18.706.579.225	24.418.314.199	38.010.183.488	42.007.591.444	43.378.203.996	46.561.794.465
1	Belanja Jasa Kantor	18.706.579.225	20.079.104.999	32.252.531.678	35.004.570.684	33.526.977.828	35.990.278.824
2	Belanja Beasiswa PNS	-	97.920.000	966.200.000	571.000.000	995.170.000	1.139.737.500
3	Belanja Premi Asuransi	-	752.500.000	753.840.000	759.500.000	4.200.000	188.102.000
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung	-	1.335.544.931	1.866.511.310	1.970.773.310	2.105.622.918	2.572.360.000
5	Belanja Sarana Mobilitas	-	172.265.000	374.375.000	443.284.000	2.176.495.000	2.344.916.641
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	-	1.980.979.269	1.796.725.500	3.258.463.450	4.569.738.250	4.326.399.500
C	PEMBIAYAAN PENGELUARAN	22.855.852.763	11.232.000.000	-	196.992.567	-	257.703.653
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	22.855.852.763	11.232.000.000	-	196.992.567	-	257.703.653
	TOTAL	494.930.522.774	573.045.081.957	624.563.545.741	642.515.320.820	705.247.773.748	713.971.280.789

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Ambon, 2017

3.3.2 Proyeksi Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu.

Untuk memproyeksi kebutuhan pembiayaan daerah periode yang akan datang, hal penting yang perlu dilakukan yakni menganalisis secara cermat perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kota Ambon di masa lalu. Langkah ini ditempuh untuk memudahkan prediksi angka defisit yang bisa berpengaruh terhadap konstruksi anggaran daerah.

Pada sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah menunjukkan angka yang cukup positif. Sisi pendapatan pada tahun 2011 adalah mencapai Rp.696.670.895.125,-, meningkat menjadi Rp.1.100.953.633.939,- bertumbuh rata-rata per tahun sebesar 9,96%. Sementara belanja daerah pada tahun 2011 adalah mencapai Rp.652.484.851.082,-, meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp.1.127.555.904.387,- bertumbuh rata-rata per tahun sebesar 11,53%.

3.3.2.1. Rasio Efisiensi.

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur perbandingan antar *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Dengan sendirinya kegiatan operasional dikatakan efisien, apabila suatu produk atau hasil kerja yang menggunakan sumberdaya dan dana seefisien serta seminimum mungkin. Untuk itu kinerja dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai tidak lebih dari 100%, karena semakin kecil nilai rasio efisien, maka semakin baik kinerja yang dihasilkan.

Dari gambaran Tabel III.10 terlihat jelas bahwa belanja pemerintah Kota Ambon setiap tahun terus menunjukkan peningkatan. Akibat meningkatnya belanja tersebut, sehingga pada tahun 2012, tahun 2015 dan tahun 2016 rasio belanja pemerintah Kota Ambon dikategorikan tidak efisien, karena berada di atas 100%. Sementara untuk tahun 2011, tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dikategorikan efisien, karena rasio efisiensi berada di bawah 100%, yakni tahun 2011 rasio efisiensi sebesar 94,66%, meningkat pada tahun 2013 sebesar 97,64%, serta menurun kembali menjadi 93,57% pada tahun 2014.

Tabel III.10. Efisiensi Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2011-2016

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Efisien (%)
2011	659.484.851.082	696.670.895.125	94,66
2012	756.207.851.018	746.464.901.518	101,31
2013	826.655.382.747	846.617.215.138	97,64
2014	891.896.488.087	953.210.956.025	93,57
2015	1.096.286.319.436	1.086.217.965.425	100,93
2016	1.127.555.904.387	1.100.953.633.939	102,42

Sumber : data diolah dari BPK dan Aset Daerah, 2017

Dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi, akan memudahkan pemerintah Kota Ambon menentukan langkah-langkah kebijakan menata dan mengelola sistem keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pengendalian dan pengawasan sudah semakin ditingkatkan.

3.3.2.2 Rasio Belanja Operasi.

Gambaran rasio belanja operasi adalah perbandingan antara total realisasi belanja operasi terhadap total belanja daerah. Pada tabel III.11, menjelaskan tentang perkembangan realisasi belanja operasi, yang ternyata sangat mendominasi pengeluaran belanja pemerintah Kota Ambon. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2016 yakni 82,34%, jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 84,05%, akan tetapi belanja operasi masih cukup tinggi. Kondisi demikian tidak dapat dihindari, karena titik berat belanja operasi terfokus pada perbaikan kesejahteraan pegawai berupa gaji dan tunjangan kesejahteraan lainnya, belanja barang dan jasa serta belanja-belanja lainnya.

Kebijakan belanja operasi perlu ditinjau serta direstrukturisasi lagi agar perhatian pemerintah Kota Ambon juga dapat melayani kebutuhan masyarakat berupa kebijakan pemberdayaan melalui belanja modal sekaligus untuk menambah aset daerah.

**Tabel III.11. Rasio Belanja Operasi Terhadap Belanja Daerah
Kota Ambon tahun 2011-2016**

Tahun	Belanja Operasi (Rp.)	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2011	554.292.398.634	659.484.851.082	84,05
2012	640.104.457.411	756.207.851.018	84,65
2013	719.193.534.309	826.655.382.747	87,00
2014	759.420.038.922	891.896.488.087	85,15
2015	891.671.444.221	1.096.286.319.436	81,34
2016	928.476.213.147	1.127.555.904.387	82,34

Sumber : data diolah dari BPK dan Aset Daerah

3.3.2.3 Rasio Belanja Modal.

Rasio belanja modal adalah perbandingan total realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah. Karena belanja modal memberikan manfaat jangka panjang dan bersifat rutin sehingga perhatian pemerintah Kota Ambon juga tetap memprioritaskan kebijakan untuk kebutuhan belanja modal.

Tabel III.12 terlihat jelas bahwa meskipun alokasi anggaran untuk membiayai kebutuhan belanja modal menunjukkan angka positif, namun masih berputar dalam kisaran rata-rata 15% setiap tahun. Padahal belanja modal sangat bermanfaat selain untuk memberdayakan masyarakat juga ikut menambah aset atau kekayaan daerah.

**Tabel III.12. Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah
Kota Ambon tahun 2011-2016**

Tahun	Belanja Modal (Rp.)	Belanja Daerah (Rp.)	Rasio Belanja Modal (%)
2011	97.459.833.541	659.484.851.082	14,78
2012	111.310.861.390	756.207.851.018	14,72
2013	105.037.351.996	826.655.382.747	12,71
2014	129.990.393.365	891.896.488.087	14,57
2015	189.110.622.775	1.096.286.319.436	17,25
2016	195.522.477.888	1.127.555.904.387	17,34

Sumber : data diolah dari BPK dan Aset Daerah

3.3.2.3. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah.

Ratio pertumbuhan pendapatan daerah bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemerintah Kota Ambon telah mengelola anggaran daerahnya untuk meningkatkan kinerja keuangan APBD dalam kondisi positif atau negatif. Dari gambaran tabel III.13, menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah pemerintah Kota Ambon terus mengalami pertumbuhan ke arah yang positif meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1,36%, jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 7,15%. Secara kuantitatif untuk tahun 2016 pertumbuhan pendapatan menurun, namun dari sisi kualitatif menunjukkan pertumbuhan yang positif dan sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2011.

**Tabel III.13. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kota Ambon tahun 2011-2016**

Tahun	Pendapatan Awal (Rp)	Pendapatan Akhir (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan (%)
2011	0	696.670.895.125	0
2012	696.670.895.125	746.464.901.518	7,15
2013	746.464.901.518	846.617.215.138	13,42
2014	846.617.215.138	953.210.956.025	12,59
2015	953.210.956.025	1.086.217.965.425	13,95
2016	1.086.217.965.425	1.100.953.633.939	1,36

Sumber : data diolah dari BPK dan Aset Daerah

3.3.2.4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi sumberdayanya untuk membiayai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Kenyataan yang ditemui selama lima tahun menunjukkan bahwa untuk membiayai tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, ternyata sumberdaya keuangan daerah Kota Ambon yang berasal PAD masih sangat rendah.

Rasio kemandirian keuangan daerah meskipun menunjukkan kenaikan ke arah positif sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, nampaknya belum dapat melayani kebutuhan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan daerah.

Dilihat dari Tabel III.14, menunjukkan bahwa pada tahun 2011, rasio kemandirian daerah Kota Ambon hanya sebesar 7,66%, sedangkan tahun 2016 meningkat menjadi 11,56%. Ini menunjukkan bahwa dari total pendapatan daerah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pemerintah Kota Ambon belum dikatakan mandiri dari sisi pengelolaan PAD. Kondisi demikian disebabkan karena sumbangan terbesar untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah masih bergantung dari investasi pemerintah pusat dan provinsi Maluku, sehingga termasuk dalam kategori rendah yang memerlukan pola hubungan konsultatif.

Pola konsultatif sendiri merupakan pola hubungan antara campur tangan pemerintah pusat dan sudah harus berkurang bila daerah telah mampu untuk melaksanakan amanat otonomisasi. Realitas menunjukkan bahwa meskipun mengalami peningkatan PAD setiap tahun tetapi ketergantungan pemerintah Kota Ambon terhadap bantuan pemerintah pusat masih sangat besar.

Tabel 3.14. Rasio Kemandirian Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio (%)
2011	53.330.533.768	696.670.895.125	7,66
2012	58.252.561.996	746.464.901.518	7,80
2013	66.178.584.704	846.617.215.138	7,82
2014	98.822.344.129	953.210.956.025	10,37
2015	115.538.441.860	1.086.217.965.425	10,64
2016	127.227.228.424	1.100.953.633.939	11,56

Sumber : data diolah dari BPK dan Aset Daerah

3.3.3 Proyeksi Kerangka Pendanaan.

Prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengisyaratkan bahwa sistem penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah harus mengedepankan asas efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab (akuntabel). Prinsip-prinsip demikian bertujuan agar daerah benar-benar dapat memanfaatkan semaksimal mungkin kemampuan pendapatan daerah untuk mendanai seluruh kebutuhan daerah sesuai kewenangannya.

Pada periode lima tahun ke depan, kebijakan penyusunan kerangka keuangan daerah pemerintah Kota Ambon, tetap mengacu pada data historis periode sebelumnya baik itu, *trend* pertumbuhan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran, serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

3.3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah.

Hasil kajian terhadap perkembangan pertumbuhan keuangan pemerintah Kota Ambon selama periode tahun 2011-2016, maka diprediksikan bahwa pendapatan pemerintah Kota Ambon akan mengalami pertumbuhan maksimal rata-rata 6,5%-9,20% pertahun untuk periode 2017-2022. Meskipun tidak mengabaikan kemampuan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang terus menunjukkan *trend* positif, realitas untuk periode lima tahun ke depan (2017-2022), Dana Perimbangan masih mendominasi kerangka pendapatan daerah pemerintah Kota Ambon.

Baik PAD maupun Dana Perimbangan masing-masing memiliki sumber pendapatan yang selama ini diandalkan oleh pemerintah Kota Ambon. Gambaran demikian dapat terlihat jelas pada Tabel III.15 tentang proyeksi pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2017-2022.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber PAD yang sangat potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kedua sumber PAD pemerintah Kota Ambon ini tetap akan mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan pendapatan dari kedua sumber ini, pemerintah Kota Ambon perlu menempuh langkah-langkah mengelola dan menatanya melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

Hasil analisis terhadap potensi PAD, diprediksi akan meningkat rata-rata per tahun sebesar 11,00-14,50% , yang berasal dari pajak daerah dengan rata-rata pertumbuhan per tahun antara 12,00%-15,00%; retribusi daerah dengan rata-rata pertumbuhan antara 9,25% -12,05%; sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah bertumbuh rata-rata dalam kisaran 2%-2,5%.

Sebagai sumber utama pendapatan daerah, Dana Perimbangan dipastikan juga akan terus meningkat terutama untuk bantuan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Khusus untuk DAK, diprediksi akan tetap dialokasikan bagi kepentingan pembiayaan kebutuhan-kebutuhan dasar dan pembangunan infrastruktur, seperti; pendidikan dasar, kesehatan, KB, infrastruktur jalan dan jembatan, perdagangan, lingkungan hidup, perikanan, perumahan dan permukiman. Sementara kebijakan bantuan Dana Perimbangan diharapkan untuk merealisasikan kebijakan pemerintah pusat menyukseskan program Nawacita.

Disamping dana bantuan di atas, juga terdapat Dana Penyesuaian yang merupakan dana tambahan untuk kebutuhan tambahan penghasilan guru, dana insentif daerah, tunjangan profesi guru serta bantuan operasional sekolah (BOS). Kontribusi dana penyesuaian diprediksi akan terus meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru maupun pengelolaan fasilitas pendidikan serta kebutuhan daerah sesuai kewenangan daerah. Lain-lain pendapatan yang sah, yang diharapkan dari Bagi Hasil Pajak Provinsi, juga diprediksi akan meningkatkan sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Kota Ambon.

Dari prediksi pertumbuhan pendapatan pada keempat pos utama di atas, maka struktur pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2017-2022 diprediksi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.142.389.200.998,- dan akan terus meningkat menjadi Rp.1.615.419.199.352,- pada tahun 2022, atau bertumbuh rata-rata per tahun sebesar 7,35%.

Dari proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah tersebut, kontribusi PAD diproyeksi bertumbuh rata-rata pertahun sebesar 11,07%, yaitu sebesar Rp.138.491.419.858,- pada tahun 2017, dan terus meningkat menjadi Rp.233.384.722.033,- pada tahun 2022. Kontribusi terbesar yang disumbangkan untuk peningkatan PAD diperoleh dari pajak daerah serta retribusi daerah.

Pada sisi lain, Dana Perimbangan diproyeksi akan meningkat dari Rp.895.652.626.400,- pada tahun 2017, menjadi Rp.1.256.471.022.426,- pada tahun 2022, dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun adalah sebesar 7,33%. Disamping itu, untuk sumber pendapatan dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diproyeksi sebesar Rp.108.245.154.740,- pada tahun 2017, dan terus meningkat menjadi Rp.125.563.454.894,- pada tahun 2022, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun adalah sebesar 3,04%.

Tabel III. 15. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Ambon Tahun 2017 - 2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Pendapatan Asli Daerah	138.491.419.858	143.242.849.711	159.377.844.188	180.280.363.276	206.346.416.598	233.384.722.033
1	Pajak Daerah	78.152.996.127	80.497.586.011	90.157.296.332	103.680.890.782	121.306.642.215	139.502.638.548
2	Retribusi Daerah	40.448.848.487	41.662.313.941	46.661.791.614	52.727.824.524	59.582.441.713	66.732.334.718
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.582.582.114	3.797.537.041	4.063.364.634	4.266.532.865	4.479.859.509	4.703.852.484
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.306.993.130	17.285.412.718	18.495.391.608	19.605.115.104	20.977.473.162	22.445.896.283
II	Dana Perimbangan	895.652.626.400	1.116.526.887.915	1.134.902.152.976	1.173.739.809.224	1.210.202.021.618	1.256.471.022.426
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	33.704.303.000	33.872.824.515	35.905.193.986	36.982.349.805	37.721.996.802	38.476.436.738
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	686.184.418.000	689.615.340.090	693.063.416.790	713.855.319.294	742.409.532.066	760.969.770.368
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	175.763.905.400	176.115.433.211	179.637.741.875	186.823.251.550	192.427.949.096	205.897.905.533
III	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	108.245.154.740	108.461.645.049	113.147.900.162	118.039.444.287	118.821.271.827	125.563.454.894
1	Dana Penyesuaian	71.477.333.400	71.620.288.067	75.201.302.470	79.713.380.618	80.111.947.521	84.918.664.373
2	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	36.767.821.340	36.841.356.983	37.946.597.692	38.326.063.669	38.709.324.306	40.644.790.521
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.142.389.200.998	1.368.231.382.675	1.407.427.897.327	1.472.059.616.788	1.535.369.710.044	1.615.419.199.352

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Meskipun Dana Perimbangan menjadi penyumbang terbesar terhadap total pendapatan daerah Kota Ambon, namun diharapkan pemerintah Kota Ambon sudah harus berupaya untuk menggali potensi sumberdayanya bagi peningkatan PAD. Hal ini penting, mengantisipasi upaya pemerintah pusat menempuh langkah-langkah kebijakan terhadap transfer daerah berupa pengurangan dana perimbangan karena keterbatasan dana, sehingga dapat berimbang terhadap berbagai kebijakan program pembangunan di daerah. Sebagai gambaran terhadap proyeksi pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada Tabel III.15.

3.3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah.

Struktur anggaran daerah periode lima tahun lalu menunjukkan bahwa porsi belanja daerah lebih besar dialokasikan untuk belanja operasi, sementara belanja modal yang berperan menambah aset daerah masih sangat terbatas. Bertolak dari pengalaman demikian, maka kebijakan belanja daerah untuk periode lima tahun ke depan (2017 - 2022), harus mempertimbangkan aspek proporsional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Hal ini penting karena seluruh kebijakan belanja daerah harus menganut prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempertimbangkan agenda pembangunan daerah.

Dinamika pembangunan lima tahun ke depan akan diperhadapkan dengan berbagai isu-isu strategis, serta perkembangan yang terjadi baik secara lokal, regional, nasional maupun pengaruh global. Situasi dan kondisi perekonomian yang sering berubah, dipastikan juga akan berpengaruh pada kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Pada level daerah, kebijakan pemerintah Kota Ambon untuk menjadikan pariwisata maupun perdagangan dan jasa sebagai unggulan pembangunan dipastikan akan berdampak pada proses penganggaran daerah. Sementara untuk tingkat nasional, kebijakan Nawacita pemerintah pusat sudah selayaknya menjadi prioritas pembangunan daerah Kota Ambon tahun 2017-2022.

Dengan mempertimbangkan kondisi demikian dan untuk mewujudkan Visi Kota Ambon tahun 2017-2022, maka seluruh kebijakan penganggaran pembangunan daerah Kota Ambon, harus mempertimbangkan seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022. Terkait dengan itu, maka proyeksi belanja daerah harus mempertimbangkan secara cermat berbagai asumsi dasar kebutuhan belanja pegawai yang setiap tahun terus menunjukkan peningkatan, kebutuhan belanja modal (publik), serta penyesuaian terhadap inflasi daerah dengan kebutuhan belanja.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, maka proyeksi anggaran belanja pemerintah Kota Ambon tahun 2017-2022 sebagaimana Tabel III.16 dipastikan akan terus meningkat. Jika pada tahun 2017 total belanja daerah pemerintah Kota Ambon diproyeksi sebesar Rp.1.153.419.870.948,- maka sejalan dengan dinamika dan pertumbuhan Kota Ambon, belanja daerah ini akan meningkat menjadi Rp.1.651.165.871.692,- pada tahun 2022 atau bertumbuh rata-rata per tahun sebesar 7,50%. Bila dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah, ternyata kebutuhan belanja daerah dianggarkan lebih besar dari pendapatan, sehingga terjadi defisit anggaran daerah yang diproyeksikan pada tahun 2017 sebesar Rp.11.030.669.950,- yang dapat selanjutnya meningkat menjadi Rp.35.746.672.339,- pada tahun 2022.

Dari total belanja daerah yang direncanakan, untuk Belanja Tidak Langsung diproyeksi pada tahun 2017 sebesar Rp.705.984.760.948,-, dan akan meningkat menjadi sebesar Rp.902.423.451.864,- pada tahun 2022, atau bertumbuh rata-rata per tahun sebesar 5,03%. Sementara untuk Belanja Langsung, diproyeksi pada tahun 2017 sebesar Rp.447.435.110.000,-, akan meningkat menjadi sebesar Rp.748.742.419.828,- pada tahun 2022, atau bertumbuh rata-rata per tahun sebesar 11,28%.

Tabel 3.16. Proyeksi Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2017 - 2022

No	Uraian	Anggaran Per Tahun (Rp)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Belanja Tidak Langsung	705.984.760.948	738.892.718.167	773.257.292.630	809.975.518.104	854.191.213.223	902.423.451.864
1	Belanja Pegawai	630.275.400.000	661.789.170.000	694.878.628.500	729.622.559.925	773.399.913.521	819.803.908.332
2	Belanja Hibah	19.850.000.000	20.247.000.000	20.348.235.000	20.449.976.175	20.756.725.818	21.171.860.334
3	Belanja Bantuan Sosial	6.750.000.000	6.750.000.000	6.952.500.000	7.230.600.000	6.869.070.000	6.869.070.000
4	Belanja Bantuan Keuangan	46.109.360.948	47.031.548.167	47.972.179.130	49.411.344.504	49.806.635.260	51.051.801.142
5	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.075.000.000	3.105.750.000	3.261.037.500	3.358.868.625	3.526.812.056
II	Belanja Langsung	447.435.110.000	585.109.368.000	654.772.999.950	693.578.243.021	717.116.194.533	748.742.419.828
1	Belanja Pegawai	24.635.100.000	25.866.855.000	26.642.860.650	27.442.146.470	28.265.410.864	29.678.681.407
2	Belanja Barang dan Jasa	230.750.010.000	299.975.013.000	329.972.514.300	353.070.590.301	360.132.002.107	367.334.642.149
3	Belanja Modal	192.050.000.000	259.267.500.000	298.157.625.000	313.065.506.250	328.718.781.563	351.729.096.272
Jumlah Belanja		1.153.419.870.948	1.324.002.086.167	1.428.030.292.580	1.503.553.761.125	1.571.307.407.756	1.651.165.871.692
Surplus/Defisit		(11.030.669.950)	44.229.296.508	(20.602.395.254)	(31.494.144.337)	(35.937.697.713)	(35.746.672.339)

Sumber : Hasil Analisis, 2017

3.3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah.

Proyeksi pembiayaan daerah bertujuan untuk merumuskan keseimbangan keuangan daerah agar tetap dalam kondisi surplus, meskipun dalam perkembangan akan terjadi defisit, namun tetap terjaga dan terkontrol, karena akan ditutup dengan SILPA tahun sebelumnya. Selain itu perlu dibentuk dana cadangan yang dapat digunakan untuk kebutuhan yang sifatnya strategis serta meningkatkan investasi daerah maupun penyertaan modal. Sementara penerimaan pembiayaan bertujuan untuk menutup defisit anggaran, melalui upaya penghematan anggaran daerah sehingga menghasilkan SILPA tahun sebelumnya, penerimaan piutang dan pinjaman daerah. Untuk itu, seluruh pengeluaran daerah lebih terfokuskan bagi pengeluaran yang sifatnya wajib seperti pembayaran utang pokok serta penyertaan modal.

Dengan mempertimbangkan berbagai agenda pembangunan daerah pemerintah Kota Ambon, serta berbagai asumsi yang dijelaskan di atas, maka proyeksi pembiayaan untuk tahun 2017 diprediksikan sebesar Rp.13.530.669.950,- dan akan terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi Rp.38.246.672.339,-. Rencana alokasi pembiayaan daerah diharapkan dari SILPA tahun sebelumnya, yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir defisit anggaran tahun berjalan.

Sementara itu, proyeksi pertumbuhan pengeluaran pembiayaan daerah diharapkan akan disumbangkan dari penyerahan modal (investasi) daerah dan akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan dan belanja daerah. Bila kebijakan penganggaran keuangan daerah Kota Ambon tetap mengedepankan prinsip anggaran berbasis kinerja yang disertai dengan sistem pelaksanaan anggaran yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel diharapkan selama lima tahun ke depan kondisi keuangan pemerintah Kota Ambon tetap menunjukkan perkembangan yang positif.

Dengan mempertimbangkan siklus pertumbuhan dan perkembangan keuangan daerah pemerintah Kota Ambon selama lima tahun sebelumnya, untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran daerah ternyata pembiayaan *netto* pada tahun 2017 diproyeksi sebesar Rp.11.030.669.950,-, dan pada akhir pelaksanaan RPJM-D Kota Ambon tahun 2022 akan meningkat menjadi sebesar Rp.35.746.672.339,-. Gambaran lebih jelas terhadap konstruksi proyeksi pembiayaan daerah Kota Ambon tahun 2017-2022 dapat diikuti pada Tabel III.17.

Tabel 3.17. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Ambon Tahun 2017 - 2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Penerimaan Pembiayaan	13.530.669.950	46.729.296.508	23.102.395.254	33.994.144.337	38.437.697.713	38.246.672.339
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	13.530.669.950	46.729.296.508	23.102.395.254	33.994.144.337	38.437.697.713	38.246.672.339
2	Pencairan Dana Cadangan						
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
4	Penerimaan Pinjaman Daerah						
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
6	Penerimaan Piutang Daerah						
II	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan						
2	Penyerahan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
3	Pembayaran Pokok Utang						
4	Pemberian Pinjaman Daerah						
5	Pembayaran Utang Pihak Ketiga						
	Pembiayaan Neto	11.030.669.950	44.229.296.508	20.602.395.254	31.494.144.337	35.937.697.713	35.746.672.339

Sumber : Hasil Analisis

3.4 Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah pemerintah Kota Ambon selama periode tahun 2011-2016 berdampak cukup baik terhadap perbaikan kesejahteraan pegawai, peningkatan infrastruktur, maupun kesejahteraan masyarakat. Meskipun pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kota Ambon terus menunjukkan angka yang positif (surplus), namun harus diakui dalam proses penataan dan pengelolaan keuangan daerah, masih ditemui beberapa permasalahan pokok yang perlu diantisipasi untuk periode lima tahun ke depan, antara lain;

- a. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih sangat rendah dan ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja operasi masih sangat besar terhadap total pengeluaran daerah.
- c. Data base pajak daerah dan retribusi daerah belum tersedia secara faktual.
- d. Sistem pengawasan dan pengendalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah belum maksimal.
- e. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Informasi data dasar terhadap dana transfer yang tidak transparansi khususnya bagi hasil pajak.
- g. Ketidakseimbangan kebutuhan fiskal daerah dengan pendapatan daerah karena perencanaan kebutuhan belanja bukan mempertimbangkan azas manfaat namun lebih mempertimbangkan aspek keinginan.

3.5 Proyeksi Ekonomi Daerah

Sejalan dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan kota Ambon ternyata ikut memengaruhi pertumbuhan ekonominya. Percepatan pertumbuhan ekonomi kota Ambon lebih banyak dipicu oleh pergerakan sektor perdagangan dan jasa pemerintahan, maupun sektor-sektor produktif lainnya. Pemerintah kota Ambon menyadari bahwa persaingan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan kota sudah semakin kompleks, maka dengan sumberdaya alam yang terbatas perlu dilakukan langkah-langkah strategis mempercepat peningkatan infrastruktur, peningkatan kapasitas pelayanan dasar, serta peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat.

Penataan regulasi terhadap sektor-sektor strategis untuk mempermudah sektor swasta berinvestasi, serta penyiapan infrastruktur yang berkualitas diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan perekonomian daerah serta meminimalisir berbagai kondisi sosial ekonomi di daerah.

3.5.1 Kebijakan Fiskal Daerah

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mendapatkan dana, dan digunakan secermat mungkin bagi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Selain itu, kebijakan fiskal juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang anggaran daerah, dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian daerah. Anggaran daerah terdiri dari penerimaan berupa hasil pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “*government expenditure*” dan “*government transfer*”. Karena itu, kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjanya, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Dalam kebijakan fiskal perlu memperhatikan dua prioritas penting, yakni **pertama**; adalah mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta masalah-masalah yang berkorelasi dengan APBD. Defisit APBD terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. **Kedua**; adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait dengan antara lain; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Dengan adanya kebijakan fiskal, diharapkan pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan yang tidak diinginkan, seperti banyaknya pengangguran, inflasi, anggaran daerah yang terus menerus defisit, serta masalah-masalah ekonomi lainnya.

Menghadapi realitas seperti yang dikemukakan di atas, sehingga sejak tahun 2011-2016, pemerintah Kota Ambon terus berupaya untuk memaksimalkan kebijakan fiskal daerah dalam mengatasi berbagai perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ini akan terus dipertahankan serta ditingkatkan pada lima tahun ke depan (2017-2022).

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah pada periode 2017-2022, pemerintah kota Ambon sudah harus merestrukturisasi kebijakan APBD khususnya terhadap kontribusi PAD dalam menghadapi kebijakan pemerintah pusat terhadap dana transfer (DAU/DAK), serta komponen belanja pegawai. Kedua variabel pengukur tersebut dapat dikatakan sangat berpengaruh pada perkembangan fiskal daerah.

Belajar dari pengalaman mengelola kebijakan fiskal daerah sepanjang tahun 2016-2022, diprediksi kemampuan fiskal daerah kota Ambon pada tahun 2017 sampai tahun 2022 akan terus mengalami perkembangan ke arah yang positif. Bila pada tahun 2017 kemampuan fiskal daerah hanya sebesar Rp.487.478.700.998, diproyeksikan akan bertumbuh menjadi Rp.765.936.609.614,-pada tahun 2022, (lihat Tabel III.18).

Tabel III.18. Proyeksi Kemampuan Fiskal Daerah Kota Ambon Tahun 2017-2022

Tahun	Variabel Pengukur				Kemampuan Fiskal (Rp.)
	Pendapat Asli Daerah (Rp.)	Transfer Bersifat Umum (Rp.)	Lain-Lain Pendapatan (Rp.)	Belanja Pegawai (Rp.)	
2017	138.491.419.858	895.652.626.400	108.245.154.740	654.910.500.000	487.478.700.998
2018	143.242.849.711	1.116.526.887.915	108.461.645.049	687.656.025.000	680.575.357.675
2019	159.377.844.188	1.134.902.152.976	113.147.900.162	721.521.489.150	685.906.408.176
2020	180.280.363.276	1.173.739.809.224	118.039.444.287	757.064.706.095	714.994.910.692
2021	206.346.416.598	1.210.202.021.618	118.821.271.827	801.665.324.385	733.704.385.658
2022	233.384.722.033	1.256.471.022.426	125.563.454.894	849.482.589.739	765.936.609.614

Sumber : Hasil Analisis, 2017

3.5.2 Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi objektif memperlihatkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ambon sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terus menunjukkan angka-angka yang cukup positif, baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Dari seluruh agregat lapangan usaha PDRB ADHB kota Ambon sampai dengan tahun 2016, menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi kota Ambon lebih didominasi oleh 8 kategori yang memberi kontribusi di atas 5%, yakni; (1) administrasi pemerintahan sebesar 25,21%; (2) perdagangan sebesar 19,57%; (3) transportasi sebesar 11,51%; (4) informasi dan komunikasi sebesar 6,73%; (5) keuangan sebesar 6,71%; (6) pertanian sebesar 5,71%; (7) pendidikan sebesar 5,49%; serta (8) konstruksi sebesar 5,13%. Sementara beberapa lapangan usaha lainnya, meskipun kontribusinya tidak terlalu menonjol namun juga ikut memberikan pengaruh bagi pertumbuhan PDRB, yakni lebih 11,94%.

Semakin cepatnya dinamika pertumbuhan dan perkembangan kota Ambon berdampak bagi pertumbuhan perekonomiannya. Atas dasar itulah, maka proyeksi PDRB dengan menggunakan "angka sangat sementara tahun 2016" untuk periode tahun 2017-2022, menunjukkan angka-angka yang positif, baik ADHK maupun ADHB.

Tabel III.19 menunjukkan bahwa ke-17 agregat lapangan usaha yang memberi kontribusi bagi PDRB ADHK, diprediksi kontribusi seluruh lapangan usaha ADHK tahun 2017 akan mencapai Rp.9.209.459,80 juta, selanjutnya meningkat menjadi Rp.11.756.760,30 juta pada tahun 2022, atau rata-rata bertumbuh pertahun 5,20%. Sementara itu, kontribusi seluruh lapangan usaha ADHB pada tahun 2017 diprediksi mencapai Rp.13.041.518,20 juta, meningkat menjadi Rp.18.021.706,20 juta pada tahun 2022, atau rata-rata bertumbuh pertahun 6,78%. Gambaran lebih jelas terhadap tingkat pertumbuhan PDRB ADHB dapat diikuti pada tabel III.20.

Tabel III.19. Proyeksi PDRB ADHK Kota Ambon Tahun 2017-2022

No	Lapangan Usaha	Proyeksi ADHK (juta rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	475.629,40	486.767,70	497.906,00	509.044,30	520.182,60	531.320,90
2	Petambangan & penggalian	24.920,20	26.421,90	27.923,60	29.425,30	30.927,00	32.428,70
3	Industri pengolahan	360.407,20	378.872,20	397.337,20	415.802,20	434.267,20	452.732,20
4	Pengadaan listrik dan gas	21.969,60	25.463,90	28.958,20	32.452,50	35.946,80	39.441,10
5	Pengadaan, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	79.759,10	81.320,80	82.882,50	84.444,20	86.005,90	87.567,60
6	Konstruksi	428.520,20	452.059,70	475.599,20	499.138,70	522.678,20	546.217,70
7	Perdagangan besar dan enceran; leparansi mobil dan sepeda motor	2.045.104,50	2.169.284,50	2.293.464,50	2.417.644,50	2.541.824,50	2.666.004,50
8	Transpotasi & pergudangan	934.209,10	966.282,50	998.355,90	1.030.429,30	1.062.502,70	1.094.576,10
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	261.979,00	258.118,60	254.258,20	250.397,80	246.537,40	242.677,00
10	Informasi dan komunikasi	887.587,90	960.802,50	1.034.017,10	1.107.231,70	1.180.446,30	1.253.660,90
11	Jasa keuangan dan asuransi	641.633,30	689.639,70	737.646,10	785.652,50	833.658,90	881.665,30
12	Real estat	28.499,40	29.243,50	29.987,60	30.731,70	31.475,80	32.219,90
13	Jasa perusahaanl	177.112,00	183.059,30	189.006,60	194.953,90	200.901,20	206.848,50
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2.055.899,20	2.173.776,00	2.291.652,80	2.409.529,60	2.527.406,40	2.645.283,20
15	Jasa pendidikan	503.865,20	541.591,30	579.317,40	617.043,50	654.769,60	692.495,70
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	95.139,00	97.651,20	100.163,40	102.675,60	105.187,80	107.700,00
17	Jasa lainnya	187.225,50	198.564,60	209.903,70	221.242,80	232.581,90	243.921,00
Jumlah ADHK		9.209.459,80	9.718.919,90	10.228.380,00	10.737.840,10	11.247.300,20	11.756.760,30
Pertumbuhan		6,15%	5,53%	5,24%	4,98%	4,74%	4,53%

Sumber : Hasil Proyeksi dengan menggunakan data BPS tahun 2016

Tabel III.20. Proyeksi PDRB ADHB Kota Ambon Tahun 2017-2022

No	Lapangan Usaha	Proyeksi ADHB (juta rupiah)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	599.052,50	615.098,90	631.145,30	647.191,70	663.238,10	679.284,50
2	Petambangan & penggalian	40.929,30	44.849,30	48.769,30	52.689,30	56.609,30	60.529,30
3	Industri pengolahan	503.118,50	543.424,40	583.730,30	624.036,20	664.342,10	704.648,00
4	Pengadaan listrik dan gas	29.137,90	35.807,10	42.476,30	49.145,50	55.814,70	62.483,90
5	Pengadaan, pengelolaan sampah, limba dan daur ulang	102.770,60	108.173,00	113.575,40	118.977,80	124.380,20	129.782,60
6	Konstruksi	641.251,20	687.275,00	733.298,80	779.322,60	825.346,40	871.370,20
7	Perdagangan besar dan eceran; leparansi mobil dan sepeda motor	2.667.725,40	2.896.591,30	3.125.457,20	3.354.323,10	3.583.189,00	3.812.054,90
8	Transpotasi & pergudangan	1.349.820,60	1.408.021,50	1.466.222,40	1.524.423,30	1.582.624,20	1.640.825,10
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	371.027,30	373.023,90	375.020,50	377.017,10	379.013,70	381.010,30
10	Informasi dan komunikasi	940.613,20	1.035.493,50	1.130.373,80	1.225.254,10	1.320.134,40	1.415.014,70
11	Jasa keuangan dan asuransi	911.258,40	997.796,50	1.084.334,60	1.170.872,70	1.257.410,80	1.343.948,90
12	Real estat	38.132,30	39.762,70	41.393,10	43.023,50	44.653,90	46.284,30
13	Jasa perusahaanl	255.792,10	268.856,80	281.921,50	294.986,20	308.050,90	321.115,60
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3.411.958,80	3.695.556,00	3.979.153,20	4.262.750,40	4.546.347,60	4.829.944,80
15	Jasa pendidikan	765.185,20	838.016,90	910.848,60	983.680,30	1.056.512,00	1.129.343,70
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	146.212,40	158.886,40	171.560,40	184.234,40	196.908,40	209.582,40
17	Jasa lainnya	267.532,50	290.922,60	314.312,70	337.702,80	361.092,90	384.483,00
Jumlah ADHB		13.041.518,20	14.037.555,80	15.033.593,40	16.029.631,00	17.025.668,60	18.021.706,20
Pertumbuhan		7,24%	7,64%	7,10%	6,63%	6,21%	5,85%

Sumber : Hasil Proyeksi dengan data BPS Tahun 2016

3.5.3 Pendapatan Per Kapita

Kontribusi kategori ekonomi pada PDRB Kota Ambon, baik ADHK maupun ADHB, ikut mempengaruhi PDRB per kapita masyarakat kota Ambon. Bila pada tahun 2011, pendapatan per kapita berdasarkan kontribusi kategori PDRB ADHK adalah mencapai Rp.18.179.000,-, pada tahun 2015 telah mencapai Rp.19.611.000,-. Sementara pendapatan per kapita berdasarkan kontribusi kategori PDRB ADHB, pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.19.490.000,-, meningkat menjadi Rp.26.455.000,- pada tahun 2015. Dengan demikian, setiap penerimaan penduduk kota Ambon pada tahun 2015 sebesar Rp.26.455.000,- setara dengan Rp.19.500.000,- pada tahun 2010.

Sejalan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan dibarengi dengan perkembangan penduduk kota Ambon lima tahun ke depan dipastikan akan berpengaruh bagi kontribusi pendapatan perkapita masyarakatnya. Kajian ini menarik karena pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat, memiliki korelasi yang sangat erat dengan jumlah penduduk.

Atas dasar inilah sehingga proyeksi pendapatan perkapita masyarakat kota Ambon untuk tahun 2017 ADHK adalah sebesar Rp.20.828.107,- meningkat menjadi Rp.23.352.853,- pada tahun 2022. Sementara proyeksi pendapatan perkapita masyarakat kota Ambon untuk tahun 2017 ADHB adalah sebesar Rp.29.494.687,- meningkat menjadi Rp.35.797.128,- pada tahun 2022 (lihat Tabel III.21).

**Tabel 3.21. Proyeksi Pendapatan Perkapita Kota Ambon
Tahun 2017 – 2022**

No	Tahun	Proyeksi Pendapatan Perkapita	
		ADHK (rp.)	ADHB (rp.)
1	2017	20,828,107	29,494,687
2	2018	21,387,527	30,891,149
3	2019	21,917,566	32,214,268
4	2020	22,420,479	33,469,674
5	2021	22,898,297	34,662,436
6	2022	23,352,853	35,797,128

Sumber ; Hasil Proyeksi, 2017

3.5.4 Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Sejalan dengan terus membaiknya kondisi perekonomian kota Ambon ke arah positif, ikut memicu pertumbuhan ekonomi setiap tahun. Selama tahun 2011-2015 angka pertumbuhan ekonom kota Ambon menunjukkan fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan per tahun berada pada kisaran 6,75%. Kondisi ini perlu dipertahankan dengan mendorong sektor-sektor prioritas seperti administrasi pemerintah, perdagangan dan jasa, pariwisata,

perikanan, maupun sektor-sektor unggulan lainnya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kota Ambon.

Perkembangan kategori (sektor) ekonomi PDRB ke arah yang positif, dengan sendirinya ikut memicu kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi kota Ambon pada periode tahun 2017-2022. Dengan mempelajari kondisi objektif pertumbuhan setiap kategori selama lima tahun lalu, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi kota Ambon untuk periode tahun 2017 sebesar 6,15%, selanjutnya pada tahun 2022 sebesar 6,50%, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 6,20%. Pertumbuhan ke arah positif ini mengindikasikan bahwa pergerakan kegiatan masyarakat menunjukkan kemajuan yang cukup positif khususnya di sektor ekonomi. Selain itu agenda-agenda daerah baik yang berskala nasional mau pun internasional diharapkan ikut memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

3.5.5 Inflasi Daerah

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (*price level*) karena harga barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat beragam. Keberagaman inilah membuat sebagian harga-harga barang tersebut di pasaran selalu meningkat yang menyebabkan terjadinya inflasi. Umumnya tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian, apalagi jika terjadi inflasi ringan yakni inflasi di bawah dua digit (10%) akan berpengaruh positif bagi pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Ambon yakni menjaga laju inflasi daerah agar tetap berada dalam kisaran di bawah dua digit (10%). Karena dengan semakin rendahnya inflasi daerah, dipastikan mempermudah sektor swasta menginvestasikan modalnya. Semakin meningkatnya investasi sektor swasta dalam meningkatkan produksinya, memberi dampak positif bagi daerah yakni tersedianya lapangan kerja baru.

Hal ini telah ditunjukkan oleh pemerintah kota Ambon pada tahun 2011-2016, dengan menjaga keseimbangan pertumbuhan perekonomian kota Ambon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengendalikan harga barang di pasaran, sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat yang semakin tinggi. Akibat kemampuan daya beli masyarakat yang semakin baik, ditunjang dengan sistem pendistribusian barang dan jasa yang memadai, sehingga selama tahun 2011-2016, laju inflasi daerah Kota Ambon rata-rata pertahun tetap terjaga antara 5,67% - 7,00%.

Perkembangan laju inflasi di atas akan tetap dipertahankan pada periode tahun 2017-2022, meskipun diproyeksikan secara nasional badai

perkenomian kemungkinan akan muncul pada beberapa tahun ke depan, khusus menjelang pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019. Menghadapi perkembangan yang demikian pemerintah kota Ambon harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengendalikan inflasi daerah agar dapat menjaga kestabilan ekonomi daerah sehingga berdampak pada pengangguran dan pengurangan angka kemiskinan di daerah.

3.5.6 Angkatan Kerja

Masalah pengangguran memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kemiskinan, dan ini sering menjadi permasalahan serius di setiap kota di Indonesia. Kota Ambon dengan potensi sumberdaya yang terbatas ikut merasakan bagaimana sulitnya menyelesaikan masalah tenaga kerja. Hal ini diakibatkan rendahnya investasi sektor swasta yang dapat memberi kesempatan peluang kerja baru untuk menyerap tenaga kerja di daerah. Selain itu, sikap sebagian warga kota yang hanya berharap untuk bekerja pada instansi-instansi pemerintah, sehingga sulit untuk memberdayakan dirinya.

Mencermati dinamika yang demikian, pada tahun 2011-2016 telah dilakukan berbagai upaya diantaranya meregulasi sistem perijinan daerah sehingga memudahkan sektor swasta berinvestasi di daerah. Beberapa investasi besar yang telah dikembangkan oleh sektor swasta pada periode tersebut berdampak pada pengurangan angka pengangguran di kota Ambon.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, ternyata sampai dengan tahun 2016 penduduk kota Ambon yang tidak memiliki pekerjaan berjumlah 10.321 orang atau 6,95%. Kondisi ini dipastikan akan bertambah, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui moratorium pegawai negeri sipil sehingga peluang untuk memiliki pekerjaan semakin sempit.

Menghadapi realitas demikian, pemerintah kota Ambon akan memprioritaskan berbagai kebijakan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga dapat bersaing merebut kesempatan kerja dan peluang pasar yang tersedia. Peluang yang diusahakan antara lain mendorong sektor swasta agar berinvestasi pada beberapa sektor unggulan yang dapat membuka kesempatan kerja baru, antara lain; pariwisata, perhotelan, kesehatan, perdagangan dan jasa, transportasi, perikanan. Sektor-sektor ini bila digerakkan, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, dan dengan sendirinya ikut membantu pemerintah Kota Ambon mengurangi angka pengangguran di Kota Ambon yang diprediksi pada tahun 2022 mencapai 6,15% dari total jumlah penduduk kota Ambon.

3.5.7 Penduduk Miskin.

Isu kemiskinan bukan saja menjadi komsumsi daerah atau nasional, akan tetapi berbagai lembaga kemanusiaan yang bernaung di bawah Perserikat Bangsa-Bangsa ikut prihatin dengan masalah ini. Menyikapi hal demikian, salah satu kebijakan dan strategi pemerintah pusat yakni menyelesaikan masalah kemiskinan dengan kebijakan Nawacita.

Data Badan Pusat Statistik Kota Ambon menggambarkan bahwa dari jumlah penduduk kota Ambon tahun 2012 sebanyak 290.798 jiwa ternyata terdapat penduduk miskin sebanyak 22.000 jiwa atau 7,57% dari jumlah penduduk kota. Meski pun terjadi pertambahan penduduk pada tahun 2015 yakni sebanyak 417.655 jiwa, namun dengan berbagai intervensi program pemberdayaan telah memicu pengurangan angka masyarakat miskin menjadi 17.940 jiwa atau 4,38%.

Dari hasil kajian analisis Universitas Pattimura, kondisi kemiskinan di Kota Ambon telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik bila dibandingkan dengan daerah lain di provinsi Maluku. Meskipun demikian masih ditemui beberapa variabel atau indikator yang menjadi fokus untuk ditangani, seperti akses masyarakat miskin kepada pendidikan, kesehatan, sanitasi, maupun infrastruktur ekonomi. Kedua fasilitas ini perlu mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan karena memiliki kualitas yang ikut memengaruhi kondisi kemiskinan di Kota Ambon.

Dalam menjawab tuntutan dan harapan masyarakat terhadap penyelesaian masalah kemiskinan, pemerintah kota Ambon pada lima tahun ke depan akan terus berupaya menyelesaikannya. Langkah strategis dilakukan antara lain dengan mengalokasikan berbagai program pemberdayaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta perbaikan dan peningkatan infrastruktur. Meskipun pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan diperkirakan pada tahun 2022 akan mencapai 503.440 jiwa, namun upaya untuk menekan angka kemiskinan menjadi komitmen prioritas pembangunan daerah. Melalui intervensi berbagai program pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta peluang penciptaan lapangan kerja baru yang terus digalakkan oleh pemerintah kota Ambon, dipastikan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan yang pada tahun 2016 sebanyak 17.940 jiwa atau 4,64%, menjadi 11.327 jiwa pada tahun 2022 atau 2,25% dari total penduduk kota Ambon.